

UU Minerba dan Freeport

AKTUAL

Edisi 46 | 17 Desember 2015 - 2 Januari 2016

Nahas Teluk Jakarta

Teluk Jakarta adalah masa depan Jakarta
Masa lalu Teluk Jakarta adalah cerita sedih Jakarta
Selamatkan Teluk Jakarta



ISSN 2337-8395



9 772337 839509

WWW.AKTUAL.COM

Rp. 30.000

aktual.com

TERHANGAT TERPERCAYA

Menyajikan informasi terhangat dan terpercaya,
disampaikan secara cepat, tepat, benar,
serta makin progresif!



INFO & PEMASARAN

 Dedy **081 20 53 8776**
Ranie **081 38 210 44 69**
Rhiza **081 828 0941 009**

 marketing@aktual.com
iklan@aktual.com

PENDIRI M Danial Nafis

KOMISARIS Yudi Latif

PEMIMPIN REDAKSI Faizal Rizki Arief

SEKRETARIS REDAKSI Tsurayya Zahra

REDAKTUR SENIOR Satrio Arismunandar,
Hendrajit, Eko Maryadi

SIDANG REDAKSI Faizal Rizki Arief, Satrio

Arismunandar, Hendrajit, Wahyu Romadhony

REDAKTUR Wahyu Romadhony, Nebby

Mahbubirrahman, Sukardjito, Ismed Eka

Kusuma, Tino Oktaviano (Foto)

ASISTEN REDAKTUR Zaenal Arifin, M Vidia

Wirawan, Karel Stefanus Ratulangi, Wisnu

Yusep, Arbie Marwan

STAF REDAKSI Soemitro, Fadlan Syam Butho,

Maulana Khamal Macharani, Nailin In Saroh,

Mochammad Zaky Kusumo, Muhammad Fikry

Hizbullah, Novrizal Sikumbang, Dadang Sah,

Agung Rizki, Warnoto (TV), Junaidi (Foto),

Munzir (Foto), Dhanu Akbar Muhammad

Daeng, Leonina K Lahama, Ludyah Annisah,

Muhammad Fikry Hizbullah, Ivan Setyadhi, Eko

Sumaryanto (Foto Komersial)

DESAIN GRAFIS Shofrul Hadi, Nelson Nafis

NETWORK Tri Wahyudi (Hd), Rendra

SMC Taufik, Iqbal Maulana

KONTRIBUTOR LUAR NEGERI Fitra Ismu

(Meksiko)

REPORTER DAERAH Masriadi Sambo

(Aceh), Najamuddin Arfah (Makasar), Damai

Oktavianus Mendrofa (Medan), Muhammad

Dasuki (Semarang), Ahmat Harris B (Surabaya),

Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), A,

Bobby Andalan (Denpasar), Andri Wawan MS

Husen (Palu), Vina Fatma Sari (Bandung), Labib

Zamzani (Yogyakarta)

DIREKTUR OPERASIONAL Rinrin

Sukmariana

MANAGER KEUANGAN Kasep Natakusumah

STAF KEUANGAN Zulkarnain, Vinka H P

HRD & KESEKRETARIATAN Nuryana

SIRKULASI Widhi Maulana, Bayu Aji

MARKETING OFFICER Dedy Kusnaedi,

Rhiza Aditya

ALAMAT REDAKSI

Graha Aktual: Jl. Tebet Barat VIII no.50 Jakarta

Selatan, Indonesia Kode pos: 12810

Telp. 021 83794508 (Hunting)

Fax. 021 83794706

redaksi@aktual.com

iklan@aktual.com

aktual.com
TERHANGAT TERPERCAYA

aktual
MEDIA



Nahas Teluk Jakarta

Pembaca yang budiman, kasus Freeport jadi pembicaraan dimana-mana. Menyedot hampir sebagian besar energi kita sehingga banyak permasalahan penting nasional lainnya jadi tersingkir.

Kalau saja eksekutif dan legislatif mau jernih, seharusnya soal ini cepat selesai jika pemahaman akar masalah sama yakni Freeport. Bukan rekaman, bukan MKD atau bukan SS atau SN. Energi politik nasional harusnya diarahkan ke bagaimana caranya agar SDA yang terkandung di Grasberg menguntungkan bangsa dan negara ini. Bukan menguntungkan Freeport atau individu-individu tertentu.

Soal Freeport adalah kasus multidimensi. Namun, sudah saatnya pemerintah memutuskan masalah-masalah tersebut supaya jangan jadi bumerang di masa depan. Ini saatnya, ini momentum paling strategis untuk menyelesaikan masalah Freeport yang tak pernah bisa selesai itu.

Topik tersebut, kembali disajikan dalam beberapa bentuk tulisan dalam edisi kali ini.

Agar, perhatian kita tak lagi tersedot seluruhnya ke Freeport, Laporan Utama Aktual kali ini

berusaha menyajikan masalah nasional yang tak kalah penting yakni soal Ahok dan teluk Jakarta. Sejarah sebenarnya sudah berkata, banyak masalah setelah proyek reklamasi Pantai Indah Kapuk digulirkan. Itu belum beberapa proyek reklamasi lainnya.

Kata analisis Amdal, proyek reklamasi tak akan menyebabkan banjir, namun faktanya justru berbicara sebaliknya. Ini baru soal lingkungan. Belum lagi soal peruntukan. Proyek reklamasi yang sudah ada ternyata hanya "dinikmati" oleh masyarakat menengah ke atas. Padahal, hakikat pembangunan daerah seharusnya diperuntukkan juga manfaatnya buat masyarakat menengah ke bawah. Rakyat kecil.

Beberapa tulisan lain yang menarik juga kami sajikan. Ada beberapa fakta ilmiah yang terkuak di seputar rumah suci umat Islam, Ka'bah. Beberapa fakta itu seakan membuka kesadaran kita bahwa Allah SWT tak main-main menetapkan Ka'bah sebagai rumah suci umat Islam.

Beberapa tulisan lain juga bisa Anda nikmati di Edisi kali ini.

Selamat membaca...

Redaksi ◦

Laporan Utama

26 Ketika Ribuan Ikan Mati Mengambang

Kontroversi proyek reklamasi di Teluk Jakarta juga terkait dengan isu lingkungan hidup. Teori penyebab matinya ribuan ikan di Pantai Ancol menjadi bahan tarik-menarik kepentingan berbagai pihak.



30 Nahas di Teluk Jakarta

Arus di Teluk Jakarta yang sudah lemah, bakal menjadi semakin lemah dengan adanya proyek reklamasi. Membuat waktu 'pencucian' (retensi) material limbah yang menumpuk semakin lambat.



34 Membaca Sasaran Strategis Tiongkok Melalui Pembangunan Pulau-Pulau Buatan di Teluk Jakarta

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberi izin Proyek Reklamasi pulau di Teluk Jakarta kepada anak perusahaan PT Agung Podomoro, yaitu PT Muara Wisesa Samudera, memang bisa jadi perkara serius.



14 AKTUAL REVIEW

Cerita John Perkins Tentang Freeport dan Newmont Sebagai VOC Gaya Baru

Modus pemberian dana bantuan dalam rangka melayani kepentingan korporasi asing, juga diungkap Perkins terkait sepak-terjang Newmont Minig Corp.

20 POLITIK

Arti Perkawanan Bagi Luhut Binsar Pandjaitan

Menteri Koordinator Bidang Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan yang langsung menyambut kemarahan Presiden. Wajar Luhut adalah pihak dalam istana yang paling banyak disebut dalam pembicaraan antara Setya, pengusaha Reza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

42 EKONOMI

Jangan Gentar dengan Ancaman Arbitrase Freeport

Terkait divestasi kata Yusri, karena dalam kontrak karya Freeport harus melakukan divestasi 51 persen sahamnya kepada Pemerintah Indonesia secara bertahap. Sehingga posisi kita jangan gentar jika suatu saat Freeport mengarbitrasekan pemerintah Indonesia.

44 EKONOMI

UU Minerba dan Freeport

Pakar Ekonomi Ichsanuddin Noorsy mengatakan jika Undang Undang Minerba selama ini lebih banyak membela kepentingan pihak Asing. Pemerintah Indonesia gagal menjaga kedaulatan energi demi kepentingan rakyatnya. Padahal, Indonesia merupakan negara yang memiliki cadangan minyak, gas dan minerba yang cukup besar.

48 INTERNASIONAL

"Berkah" dari Sikap Anti-Islam Donald Trump

Kampanye Donald Trump yang anti-Muslim awalnya dikhawatirkan akan memperburuk posisi Muslim Amerika pasca aksi teror Paris. Namun, reaksi balik terhadap Trump justru menguntungkan kaum Muslim, yang citranya sempat rusak oleh ISIS.

50 LIFE

Minilah Rahasia Tersembunyi Kabah di Mekah

Misteri Kabah, sama seperti rahasia Allah SWT, dimana kuasa Allah SWT-lah yang paling Maha Kuasa untuk Alam Semesta ini. Banyak peneliti yang mengatakan bahwa Kabah menjadi titik atau pusat dari Bumi.

52 LIFE

Situs Bersejarah di Tanah Suci Sudah Habis

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), KH Said Aqil Siradj, menyatakan, situs bersejarah di Tanah Suci yang berkaitan dengan kesejarahan Islam, sudah tak lagi wujud fisiknya alias habis.

Lengkapi kebutuhan informasi terkini dengan mengunduh Portal berita Aktual di smartphone Android Anda. Berita tersaji selama 24 jam dalam 7 hari seminggu dengan standar jurnalisme berkualitas yang meliputi berbagai peristiwa nasional maupun internasional.

3	Tatat Redaksi	12	Lensa Aktual	40	Kilas Hukum
5	Terkini	18	Kilas Peristiwa	46	Kilas Ekonomi
6	Kaki Hari	24	Kilas Politik	54	Oase

Lima Catatan di Pilkada Serentak

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TEPI) Jerry Sumampouw memberi lima catatan yang perlu dikemukakan terhadap pelaksanaan Pilkada serentak 2015 pada Rabu (9/12).

“Pilkada serentak 2015 secara umum berjalan baik, lancar, dan aman. Tak ada persoalan dan gangguan yang cukup menonjol yang menghalangi pelaksanaannya,” kata Jerry, di Jakarta, Kamis (10/12).

Menurutnya, rakyat di 264 daerah yang tersebar di hampir seluruh Indonesia telah memberikan hak pilihnya dengan baik, gembira, dan suka cita.

“Tentunya ada juga persoalan tetapi tak mengganggu jalan pemungutan suara di TPS,” katanya.

Namun demikian, ada beberapa catatan yang perlu dikemukakan terhadap pelaksanaan Pilkada tersebut.

Pertama, kata Jeirry, Pilkada ternodai oleh ditundanya lima daerah karena persoalan yang bersumber pada pencalonan, khususnya masalah hukum yang dialami oleh pasangan calon di mana berbuntut panjang sampai gugatan pengadilan dan putusan PT Tata Usaha Negara (TUN)

“Akibatnya Pilkada serentak 2015 ini menjadi tak serentak. Kita masih menunggu kapan Pilkada di lima daerah tersebut akan dilaksanakan,” tuturnya.

Kedua, partisipasi pemilih diprediksi tak terlalu menggembarakan, bahkan cenderung rendah. Dalam pantauan secara umum, kelihatannya angkanya tak lebih dari 60 persen, padahal target KPU dan pemerintah ada di angka 70 persen.

“Contohnya, seperti di Kota Surabaya saja yang memiliki pasangan calon (paslon) favorit seperti Risma-Wisnu, angka partisipasinya tak lebih dari 50 persen. Namun demikian, kita masih menunggu hasil akhirnya nanti,”

ujarnya.

Selanjutnya yang ketiga, paslon petahana menang di hampir semua daerah di mana mereka menjadi paslon. Hal ini sesuai dengan hasil hitung cepat yang dilakukan beberapa lembaga survei.

“Jadi, Pilkada serentak ini merupakan milik para paslon petahana. Bahkan, perolehan suaranya jauh melebihi lawan-lawannya seperti di Kota Tangerang Selatan, Surabaya, Kabupaten Siak Sulawesi Tengah, dan lain-lain,” ucap Jeirry.

Kemudian, masih marak terjadinya politik uang. “Di sana-sini masih ditemukan praktik politik uang yang dilakukan oleh tim sukses paslon di beberapa daerah. Ini tentu membuat kualitas hasil Pilkada ini mengalami penurunan,” katanya.

Terakhir, sesuai info Bawaslu RI, ada beberapa daerah yang harus mengalami pemungutan suara ulang karena ada pelanggaran ketika pemungutan suara seperti pemilih mencoblos dua kali, pemilih yang bukan warga daerah tersebut memilih, dan lain sebagainya.

Karel Stefanus Ratulangi-Ant

Penyelidikan Ungkap Korban Mina Mencapai 2.411 Jamaah Haji



Hasil penyelidikan dan penghitungan independen yang dilakukan kantor media Associated Press (AP) tragedi Mina yang terjadi pada September 2015 lalu, dilaporkan menewaskan lebih 2.411 jamaah Haji.

Sementara itu pemerintah Arab Saudi yang hanya menyebutkan 769 korban tewas dalam laporan resminya. Hal ini menunjukkan jumlah lebih dari tiga kali lipat.

Hasil penghitungan AP itu menjadikan Tragedi Mina tahun ini sebagai peristiwa paling berdarah dalam penyelenggaraan ibadah Haji.

Penghitungan yang dilakukan AP didasarkan berdasarkan laporan media-media nasional dan komentar pejabat dari 36 negara yang mengirimkan jamaah hajinya. Lebih dari 180 negara mengirimkan jamaah hajinya ke Arab Saudi.

Perlu diketahui, Pemerintah Arab Saudi yang belum mengubah jumlah korban tewas dalam laporan resminya sejak 26 September 2015 belum memberikan tanggapan atas selisih jumlah korban yang begitu besar ini. Kantor berita Negara Kerajaan itu tidak lagi menyebutkan mengenai Tragedi Mina sejak 19 Oktober 2015.

Saat itu Putra Mahkota sekaligus Menteri Dalam Negeri Mohammed bin Nayef mengatakan penyelidikan masih berlangsung. *Sukardjito*



Globalisasi, Ancaman Ideologis dan Antisipasi Pancasila

Di muka Kongres Amerika Serikat, dalam kunjungan pertamanya ke negeri ini (16 Mei-3 Juni 1956), Bung Karno dengan kepercayaan diri yang tinggi berpidato menguraikan Pancasila. Setiap sila disebutkan, hadirin bertepuk riuh diakhiri dengan standing ovation yang panjang. Tampak di sana, betapapun rumusan Pancasila itu digali dari bumi Indonesia sendiri, kandungan nilainya bisa diterima secara universal.

Keberanian Bung Karno mengkampanyekan Pancasila pada dunia itu kembali disampaikan dalam pidatonya di depan PBB, 30 September 1960, yang berjudul "To Build the World Anew". Ia menyangkal pendapat seorang filosof Inggris, Bertrand Russel, yang membagi dunia ke dalam dua poros ideologis. "Maafkan, Lord Russell. Saya kira tuan melupakan adanya lebih daripada seribu juta rakyat, rakyat Asia dan Afrika, dan mungkin pula rakyat-rakyat Amerika Latin, yang tidak menganut ajaran Manifesto Komunis ataupun Declaration of Independence." Selanjutnya ia katakan bahwa Indonesia tidak dipimpin oleh kedua paham

itu; tidak mengikuti konsep liberal maupun komunis. "Dari pengalaman kami sendiri dan dari sejarah kami sendiri tumbuhlah sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih sesuai, sesuatu yang jauh lebih cocok." Lantas ia simpulkan, "Sesuatu itu kami namakan Pancasila. Gagasan-gagasan dan cita-cita itu, sudah terkandung dalam bangsa kami. Telah timbul dalam bangsa kami selama dua ribu tahun peradaban kami dan selama berabad-abad kejayaan bangsa, sebelum imperialisme menenggelamkan kami pada suatu saat kelemahan nasional."

Russel mengomentari pidato Bung Karno itu dalam suatu harian di Inggris dengan menyatakan bahwa Pancasila merupakan sintesis kreatif dari ideologi dunia dan menyebut Soekarno sebagai Great Thinker in the East. (Achdiat K. Mihardja (2005: 79).

Tujuh puluh tahun setelah para pendiri bangsa menggagas Pancasila sebagai dasar falsafah berbangsa dan bernegara, hari ini adalah momen reflektif bagi bangsa Indonesia untuk menilai apakah falsafah tersebut masih relevan atau telah diusangkan (outlived) oleh krisis multidimensional yang melanda negeri?



Telah berlalu masa yang panjang ketika kekayaan dan keindahan negeri ini tak membawa kemakmuran, kelimpahan penduduk tak memperkuat daya saing, kemajemukan kebangsaan tak memperkuat ketahanan budaya, keberagaman tak mendorong keinsyafan berbudi.

Apakah ini semua ditimbulkan oleh cacat inheren dari falsafah Pancasila, atau justru merupakan akibat pelalaian dan penodaan nilai-nilai Pancasila? Untuk itu marilah kita lihat kecenderungan utama dalam perkembangan globalisasi dan implikasinya bagi kehidupan umat manusia, serta bagaimana daya antisipasi Pancasila dalam menjawab tantangan ini.

Globalisasi dan Implikasi Ideologisnya

Globalisasi modern dan pasca-modern menemukan pijakannya dari perlombaan gengsi antarnegara adikuasa yang mengarah pada

penemuan-penemuan teknologi mutakhir, terutama dalam bidang persenjataan yang kemudian berkelindan dengan bidang telematika. Keberadaan teknologi satelit, yang kemudian disusul oleh penemuan fiber optic, serta aneka kecanggihan teknologi informasi dan telekomunikasi, menandai era baru dalam komunikasi antarmanusia yang melampaui hambatan-hambatan ruang dan waktu.

Dengan berbagai penemuan mutakhir dalam bidang komunikasi dan informatika, dunia mengalami arus globalisasi yang makin luas cakupannya, dalam penetrasinya, dan instan kecepatannya. Yang dimaksud dengan globalisasi dini, seperti kata Anthony Giddens (1990), "adalah intensifikasi relasi-relasi sosial dunia yang menghubungkan lokalitas yang berjauhan sedemikian rupa sehingga peristiwa-peristiwa lokal dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi jauh di seberang dan

begitupun sebaliknya".

Globalisasi merestrukturisasi cara hidup umat manusia secara mendalam, nyaris pada setiap aspek kehidupan. Berhembus pertama kali dari pusat-pusat adidaya, globalisasi pada akhirnya menerpa semua bagian dunia, tak terkecuali negara adikuasa sendiri, meskipun dengan konsekuensi yang tak merata. Dengan perluasan, pendalaman dan percepatan globalisasi ini, lingkungan strategik yang mempengaruhi perkembangan negara-bangsa merupakan resultante dari kesalingterkaitan antar berbagai elemen terpenting dalam lingkungan global, regional, nasional, dan lokal. Dampak yang ditimbulkannya bersifat mendua, yang dikenal dengan istilah 'global paradox': memberi peluang dan hambatan, positif dan negatif

Pada ranah negara-bangsa (nation-state) di satu sisi, globalisasi menarik (pull away) sebagian dari kedaulatan negara-bangsa dan

komunitas lokal, tunduk pada arus global interdependence, yang membuat negara-bangsa dirasa terlalu kecil untuk bisa mengatasi (secara sendirian) tantangan-tantangan global. Dalam situasi kesalingtergantungan, tidak ada negara yang bisa mengisolasi dirinya. Kelemahan suatu elemen negara terhadap penetrasi kekuatan global ini bisa melumpuhkan dirinya. Bahkan negara adikuasa seperti Uni Soviet menjadi korban globalisasi yang didorong temuan-temuan teknologinya sendiri. Meski dalam kadar dan implikasi yang tak sama, krisis perekonomian sebagai konsekuensi globalisasi juga melanda Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya pada awal milenium baru.

Bagi Indonesia sendiri, globalisasi modern membawa politik nasional ke pusaran gelombang demokratisasi ketiga di dunia, yang menurut Huntington bermula pada 1974 dan menerpa Indonesia melalui gerakan reformasi pada akhir 1990-an. Gelombang demokratisasi ini melanda Indonesia ketika otoritas negara mendapatkan tekanan yang serius dari penetrasi kekuatan-kekuatan global, yang setelah perang dingin berakhir, terutama datang dari kekuatan fundamentalisme pasar dan fundamentalisme agama.

Di sisi lain, globalisasi juga menekan (push down) negara-bangsa, yang mendorong ledakan ke arah desentralisasi dan otonomisasi. Negara-bangsa menjadi dirasa terlalu besar untuk menyelesaikan relik-relik masalah di tingkat lokal, yang menyulut merebaknya etnonasionalisme dan tuntutan otonomi lokal beriringan dengan revivalisme identitas-identitas kedaerahan. Dalam planet bumi yang dirasa kian "mengecil", jumlah negara bangsa justru kian bertambah. Antara 1960 dan 2006, anggota PBB bertambah hampir dua kali lipat dari 99 menjadi 192, dengan pertambahan cepat terjadi menyusul kehancuran Blok-Timur (antara 1992-2006 terjadi penambahan

sekitar 13 anggota baru). Seiring dengan itu, antara 1975 dan 2002, lebih dari 60 (asosiasi) kebangsaan diterima sebagai anggota baru Federation of International Football Association (FIFA). Bagi Indonesia sendiri, tekanan globalisasi yang bertaut dengan demokratisasi ini mendorong otonomisasi daerah dan pemekaran wilayah disertai kecenderungan revivalisme etno-religius.

Pada ranah ekonomi, di satu sisi, pergerakan global dari ide-ide, orang, teknologi dan barang memberi peluang-peluang baru dalam perekonomian, terutama bagi negara-bangsa dan pelaku ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif. Perdagangan dunia saat ini jauh lebih luas cakupannya dan instan kecepatannya di banding periode mana pun dalam sejarah umat manusia. Yang paling menonjol adalah lonjakan dalam tingkat arus finansial dan kapital yang difasilitasi oleh perekonomian elektronik (economy electronic). Intensifikasi penguasaan ruang dan waktu lewat arus globalisasi berpengaruh besar bagi perilaku dunia usaha. Pergeseran modus produksi Fordisme (yang kaku dan kurang mobil) ke sistem akumulasi fleksibel (yang beroperasi dengan kelenturan dan layanan just-in-time) merupakan eksemplar bagaimana pengelolaan atas ruang dan waktu semakin signifikan dalam kapitalisme lanjut di era globalisasi ini.

Di sisi lain, dengan posisi awal dan konsekuensinya yang tidak sama, globalisasi membelah dunia ke dalam pihak "yang menang" (winners) dan "yang kalah" (losers), serta menumbuhkan ketidakesetaraan baik secara internasional maupun dalam negara-bangsa (Hobsbawm, 2007: 3). Selain itu, kecenderungan negara-negara terbelakang untuk terjerat utang luar negeri, korupsi dan lemah dalam kontrol regulasi memudahkan penetrasi korporasi-korporasi internasional (dengan jejak rekam yang buruk dalam

soal lingkungan) untuk merelokasi usahanya ke negara-negara tersebut. Akibatnya, globalisasi bukan saja menimbulkan "global village" (dusun dunia), tetapi juga "global pillage" (perampasan dunia).

Globalisasi juga menjadi kendaraan emas bagi para pendukung pasar bebas untuk mendorong liberalisasi perdagangan dan investasi dalam skala mondial. Kecenderungan ini mengakibatkan pasar menjadi berkembang begitu bebas tanpa ada satu kekuatan pun yang dapat memastikan apa yang akan terjadi, yang akan mempengaruhi kemandirian perekonomian nasional. Pasar bebas dunia pada gilirannya melemahkan kemampuan negara-bangsa dan sistem-sistem kesejahteraan untuk melindungi jalan hidupnya (Hobsbawm, 2007: 4).

Globalisasi dan perdagangan bebas juga mengandung kemungkinan gejala "penunggang bebasnya" (free-riders) tersendiri. Bahwa suatu organisme bisa melakukan tindakan di luar tujuan aslinya, bahkan melakukan sesuatu yang berkebalikan dari niat awalnya. Dalam konteks kelembagaan antarbangsa, ada beberapa institusi yang semula didirikan dengan tujuan menolong, justru digunakan untuk tujuan sebaliknya. Hal inilah yang terjadi dengan IMF dan World Bank. Ketika didirikan, premis kebijakannya diletakkan pada pengandaian-pengandaian John Maynard Keynes. Tetapi kemudian IMF menjadi pintu bagi terjadinya globalisasi korporasi dan juga kegiatan spekulasi tingkat dunia, tanpa memperhatikan dampak tingkah lakunya.

Pemiskinan global mengalami percepatan terutama dengan rejim pemotongan pajak dan minimal state sejak tahun '80-an, yang kemudian mendorong korporasi-korporasi swasta (internasional) mengambil alih hampir semua kegiatan ekonomi, dan mengambil keuntungan dengan persentasi yang luar biasa besar. Pada saat

yang sama, IMF dan World Bank tidak dapat dijangkau dengan alat kedaulatan hukum apapun, bahkan hukum internasional.

Dengan kata lain, liberalisasi perdagangan diikuti oleh kecenderungan berkurangnya kebebasan pemerintahan nasional untuk menentukan kebijakannya, akibat dari adanya pengaruh kekuatan-kekuatan komersial (keuangan internasional dan multinasional) dan lembaga-lembaga supra-nasional (Bank Dunia, IMF, dll). Kecenderungan globalisasi seperti itu membawa tantangan yang serius pada usaha-usaha pemuliaan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Globalisasi memang meningkatkan kesadaran akan HAM di Dunia Ketiga, namun sekaligus juga memasok hambatan baru yang membuat idealisasi HAM itu sulit diimplementasikan dalam praksis pembangunan.

Halangan dalam promosi HAM muncul sejak tahun '80-an dari hegemoni ideologi neo-liberalisme yang menyerang pondasi dasar pada sistem hak asasi manusia yang telah dibangun: kombinasi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan perluasan pasar tanpa kepedulian sosial, globalisasi pasar meningkatkan ketaksetaraan di dalam negara, dan jurang pemisah yang makin lebar antara negara maju dan berkembang.

Tantangan-tantangan globalisasi pasca Perang Dingin memerlukan komitmen dan visi internasionalisme baru yang relevan dengan perkembangan zaman. Tantangannya adalah bagaimana mengembangkan praktik demokratis dalam skala transnasional untuk merespon realitas global yang saling tergantung. Problem dalam tata dunia hari ini, menurut penilaian William Connolly (1991), adalah terjadinya kesenjangan antara perkembangan waktu (temporality) dan ruang (spatiality); yakni ketidakcocokan antara realitas sosial-politik era globalisasi dengan struktur kenegaraan, antara

perkembangan ekonomi yang kian merobohkan batas-batas teritorial dengan perkembangan demokrasi politik yang masih tekungkung dalam batas teritorial negara-bangsa.

Hal senada dikemukakan oleh Eric Hobsbawm, yang menilai bahwa 'demokrasi elektoral tak dapat berfungsi secara efektif di luar unit-unit politik seperti negara-bangsa' (Hobsbawm, 2007: 118). Negara kuat atau aktor non-negara yang punya global intent sering mengabaikan prosedur demokrasi dalam merealisasikan ambisinya. Di lain pihak, kelompok-kelompok yang marginal dalam demokrasi politik negara-bangsa, berusaha melepaskan keterkaitannya dengan demokrasi dan negara-bangsa dengan melakukan retradisionalisasi politik, seperti mengidealkan kekhalfahan.

Jika demokrasi elektoral bukanlah sarana yang efektif untuk memecahkan masalah-masalah global atau transnasional, Hobsbawm memberi isyarat tentang alternatif nonelektoral. Ia mengajukan contoh keberadaan badan transnasional seperti Uni Eropa, yang mampu berkembang menjadi struktur yang kuat dan efektif justru ketika tidak melibatkan popular electorate, melainkan melalui prosedur-prosedur permusyawaratan yang melibatkan sejumlah kecil perwakilan pemerintah anggota (Hobsbawm, 2007: 118). Dengan demikian, proses-proses demokrasi permusyawaratan dalam semangat kegotong-royongan merupakan alternatif bagi pengembangan politik demokratisasi non-teritorial dari isu-isu global.

Singkat kata, intensifikasi globalisasi modern menuntut setiap bangsa untuk lebih memiliki wawasan internasionalisme dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia yang menjamin kemerdekaan, perdamaian dan keadilan dalam pergaulan antarbangsa. Hal ini menuntut perubahan paradigmatis dalam hubungan internasional dari

prinsip ‘zero-sum-game’ menuju prinsip “win-win-solution”. Hal itu bisa ditempuh, antara lain, dengan cara memperluas praktik demokrasi melampaui batas-batas teritorial negara-bangsa, melalui penguatan daya-daya permusyawaratan, restrukturisasi dalam lembaga-lembaga multilateral, serta partisipasi warga bangsa dalam persoalan kemanusiaan universal.

Akhirnya ada perkembangan yang bersifat paradoks. Di satu sisi, globalisasi mengurangi otoritas negara-bangsa. Di sini lain, negara yang mampu mengambil keuntungan dari globalisasi justru negara yang kuat, seperti ditunjukkan oleh China. Akan tetapi perlu dicatat, pengertian kuat di sini tidaklah sebangun dengan otoritarianisme, melainkan merujuk pada kapasitas negara untuk mempertahankan otoritasnya melalui regulasi dan penegakan hukum (law enforcement).

Dengan demikian, harus ada keseimbangan antara komitmen internasionalisme dan nasionalisme, pemberdayaan international governance dan pemberdayaan negara-bangsa. Pada titik ini, antisipasi sila kedua Pancasila seperti dikemukakan oleh Soekarno sudah tepat. “Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam tamansarinya internasionalisme.”

Antisipasi Pancasila

Berbagai tantangan dalam kehidupan global dan domestik di atas dikemukakan sekadar untuk melihat apakah nilai-nilai Pancasila masih relevan atau telah diusangkan oleh perkembangan zaman?

Nyatanya, berbagai persoalan kontemporer yang disebutkan, jauh-jauh hari telah diantisipasi oleh Pancasila.

Dalam mengantisipasi kemungkinan menguatnya fundamentalisme agama, sila

pertama menekankan prinsip ketuhanan yang berkebudayaan dan berkeadaban. Seperti dinyatakan Bung Karno, “Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiadanya ‘egoisme-agama’... Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain.”

Dalam mengantisipasi dampak-dampak destruktif dari globalisasi dan lokalisasi, dalam bentuk homogenisasi dan partikularisasi identitas, prinsip “sosio-nasionalisme” yang tertuang dalam sila kedua dan ketiga Pancasila telah memberikan jawaban yang jitu.

Dalam prinsip “sosio-nasionalisme”, kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, berdiri atas prinsip semua untuk semua. Saat yang sama, kebangsaan Indonesia juga kebangsaan yang berperikemanusiaan, yang mengarah pada persaudaraan, keadilan dan keadaban dunia. Dikatakan Bung Karno, “Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam tamansarinya internasionalisme”.

Dalam mengantisipasi tirani dan ketidakadilan dalam politik dan ekonomi, prinsip “sosio-demokrasi” yang tertuang dalam sila keempat dan kelima Pancasila, memberi solusi yang andal. Menurut prinsip ini, demokrasi politik harus bersejalan dengan demokrasi ekonomi. Pada ranah politik, demokrasi yang dikembangkan adalah demokrasi permusyawaratan (deliberative democracy) yang bersifat imparial, dengan melibatkan dan mempertimbangan pendapat semua pihak secara inklusif. Pada

ranah ekonomi, negara harus aktif mengupayakan keadilan sosial, dalam rangka mengatasi dan mengimbangi ketidaksetaraan yang terjadi di pasar, dengan jalan menjaga iklim kompetisi yang sehat, membela yang lemah, serta berinvestasi dalam public goods yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dengan semangat dasar kelima prinsip Pancasila, negara/bangsa Indonesia memiliki pandangan dunia yang begitu visioner dan tahan banting. Prinsip-prinsip dalam Pancasila mampu mengantisipasi dan merekonsiliasikan antara paham kenegaraan radikalisme sekularis dan radikalisme keagamaan, antara paham kebangsaan homogenis dengan tribalisme atavistik, antara kebangsaan yang chauvinis dengan globalisme triumphalis, antara pemerintahan autokratik dengan demokrasi pasar-individualis, antara ekonomi etatisme dengan kapitalisme predatoris.

Diperlukan puluhan tahun sejak perang dunia kedua bagi bangsa-bangsa lain untuk memasuki jalan tengah keemasan itu. Adapun bangsa Indonesia telah meletakkannya di titik awal berdirinya Republik. Sayang, masalah bangsa ini memang kerap pandai memulai namun gagal memelihara dan mengakhiri. Tatkala bangsa-bangsa lain mulai mengengok warisan pemikiran terbaik bangsa ini, bangsa Indonesia sendiri mulai mengabaikannya.

Penutup: Pembumian Pancasila

Diperlukan penyegaran pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila untuk menangkal berjangkitnya beragam ancaman ekstremisme. Dengan menguatkan nilai-nilai Ketuhanan yang berkebudayaan, kebangsaan yang berprikemanusiaan, serta demokrasi permusyawaratan yang berorientasi keadilan sosial, Indonesia akan mampu menghadapi perkembangan baru dengan suatu visi global yang berkearifan lokal.

Tinggal masalahnya, bagaimana

memperdalam pemahaman, penghayatan, dan kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila dan kesalingterkaitannya satu sama lain, untuk kemudian diamalkan secara konsisten di segala lapis dan bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di sinilah letak masalahnya. Setelah 70 tahun Pancasila dilahirkan, keluhuran nilai-nilainya sebagai dasar dan haluan bernegara terus diimpikan tanpa kemampuan untuk membumikannya.

Setiap pandangan hidup atau ideologi yang ingin mempengaruhi kehidupan secara efektif, tak bisa diindoktrinasi sebatas upacara, melainkan perlu mengalami apa yang disebut Kuntowijoyo sebagai proses “pengakaran” (radikalisasi). Proses radikalisasi ini melibatkan tiga dimensi ideologis: keyakinan (mitos), penalaran (logos), dan kejujuran (etos).

Pada dimensi mitos, radikalisasi Pancasila diarahkan untuk meneguhkan kembali Pancasila sebagai ideologi negara. Pada sisi ini, bangsa Indonesia harus diyakinkan bahwa, seperti kata John Gardner, “Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu tidak memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar.” Mematrikan keyakinan pada hati warga tidak selalu bersifat rasional. Pendekatan afektif-emosif dengan menggunakan bahasa seni-budaya dan instrumen multimedia akan jauh lebih efektif.

Pada dimensi logos, radikalisasi Pancasila diarahkan untuk mengembangkan Pancasila dari ideologi menjadi ilmu. Pancasila harus dijadikan paradigma keilmuan yang melahirkan teori-teori pengetahuan dan komunitas epistemiknya. Proses objektivikasi ini penting karena ilmu merupakan jembatan antara idealitas-ideologis dan realitas-kebijakan. Setiap rancangan perundang-undangan

semestinya didahului oleh naskah akademik. Jika pasokan teoritis atas naskah ini diambil dari teori-teori pengetahuan yang bersumber dari paradigma-ideologis yang lain, besar peluang lahirnya kebijakan perundang-undangan yang tak sejalan dengan imperatif moral Pancasila.

Pada dimensi etos, radikalisasi Pancasila diarahkan untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan daya juang agar Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial. Dalam kaitan ini, Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal (negara) menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal, serta menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara.

Pancasila adalah dasar persatuan dan haluan kemajuan-kebahagiaan bangsa. Selama kita belum bisa membumikan nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, selama itu pula bangsa Indonesia akan sulit meraih kemajuan-kebahagiaan yang diharapkan.

Radikalisasi Pancasila merupakan suatu kemestian, betapapun hal itu merupakan pekerjaan yang sulit di suatu negeri yang dirundung banyak masalah. Namun, dengan semangat gotong-royong yang menjadi nilai inti Pancasila, kesulitan itu bisa ditanggung bersama.

Dalam membangkitkan semangat itu, diperlukan semangat kerjasama dengan kepemimpinan yang dapat memulihkan kembali kepercayaan warga pada diri dan sesamanya. Kekuasaan digunakan untuk menguatkan solidaritas nasional dengan memberi inspirasi kepada warga untuk mencapai kemuliaannya dengan membuka diri penuh cinta pada yang lain. Warga menyadari pentingnya keterlibatan dalam kehidupan publik untuk bergotong-royong merealisasikan kebijakan bersama. ◦

LENSA AKTUAL

Rapat Paripurna Ditunda

Anggota DPR melihat rekaman video Menteri ESDM yang bersaksi dalam sidang MKD atas Ketua DPR Setya Novanto saat menunggu dimulainya Rapat Paripurna ke-12 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/12) malam. Paripurna yang akan membahas laporan Baleg DPR terhadap RUU Pengampunan Pajak dan RUU Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tersebut ditunda karena jumlah kehadiran anggota DPR tidak kuorum.

Antara Foto - Sigid Kurniawan





Cerita John Perkins Tentang Freeport dan Newmont Sebagai VOC Gaya Baru

Kisruh soal perpanjangan kontrak Freeport yang bermuara pada terbelahnya para menteri di jajaran kabinet pemerintahan Jokowi-JK, saya jadi ingat beberapa kisah menarik kesaksian John Perkins, mantan bandit ekonomi binaan intelijen Amerika Serikat.

Melalui bukunya yang terkenal “Confession of Economic Hitman dan The Secret History of the American Empire”, sepak-terjang beberapa korporasi AS itu terungkap. Pada 1995, Perkins sempat dikontak sebuah firma konstruksi dan konsultan Stone and Webster Engineering Company (SWEC).

SWEC mengatakan kepada Perkins, berencana untuk membangun proyek kompleks pemrosesan bahan kimia di Indonesia yang bernilai kurang lebih 1 milyar dolar AS. Namun yang bikin SWEC kebingungan, bagaimana caranya membayar salah seorang anggota keluarga Suharto sebesar 150 juta dolar AS. Itulah makanya pihak SWEC bertanya kepada Perkins yang waktu itu masih jadi bandit ekonomi yang punya pengalaman luas bermain di Indonesia.

Perkins menawarkan empat opsi untuk menyuap para pejabat tinggi maupun keluarga para pejabat tersebut. Dalam hal proyeknya SWEC ini yang dimaksud adalah keluarga Suharto. Pertama, sewa bulldozer, mesin Derek, truk, dan peralatan berat lainnya dari perusahaan milik keluarga Suharto dan kroninya dengan harga lebih tinggi dari harga normal.

Kedua, dengan mengalihkan kontrak beberapa proyek kepada perusahaan milik keluarga tersebut dengan harga tinggi. Ketiga, menggunakan cara serupa untuk



John Perkins

memenuhi kebutuhan makanan, perumahan, mobil, bahan bakar, dan kebutuhan lainnya. Dan keempat, mereka bisa menawarkan diri untuk memasukkan putra-putri para kroni orang Indonesia itu ke beberapa kampus prestisius AS, menanggung biasaya mereka, dan menggaji mereka setara dengan konsultan dan pegawai perusahaan ketika berada di AS.

Berdasarkan pengalaman Perkins sebelumnya sebagai bandit ekonomi pelayan beberapa korporasi asing di Indonesia, siasat tersebut biasanya sangat berhasil untuk membelokkan arah kebijakan pemerintahan yang menguntungkan korporasi-korporasi asing. Bahkan beberapa perusahaan dan eksekutif AS yang pernah melakukan praktik-praktik semacam ini tak pernah terseret hukum.

Hanya saja, Perkins mungkin tak membayangkan bahwa tiga tahun kemudian, pada Mei 1998, pemerintahan Suharto runtuh yang berakibat seluruh keluarga dan kroni bisnis Cendana tidak lagi berada dalam posisi mengatur arah kebijakan perekonomian nasional. Alhasil, skenario SWEC hancur berantakan.

Pada 15 Maret 2006, The Boston



Globe memuat tajuk di halaman muka: Memo Suap dan Bangkrutnya Stone & Webster. Dalam liputannya the Boston Globe membeberkan kisah tragis bagaimana perusahaan yang berdiri sejak 1889 dan punya sejarah yang cemerlang itu ambruk dengan mencatatkan kebangkrutannya pada 2000. Sehingga perusahaan itu diakuisisi Shaw Group.

Dalam kesimpulan wartawan Globe, Steve Bailey, keruntuhan tersebut berpangkal pada “Memo Kritis” yang membeberkan suatu usaha rahasia perusahaan secara mendetail. Yaitu membayar suap senilai 147 juta dolar AS kepada seorang kerabat Presiden Suharto untuk mengamankan kontrak terbesar sepanjang sejarah Stone & Webster.

Apakah *rent seeking activities* seperti terungkap melalui kesaksian Perkins tersebut kemudian berhenti menyusul kejatuhan Suharto dan beralihnya pemerintahan ke tangan sipil? Sepertinya, hanya ganti aktor



Petugas dari satuan Brimobda DIY Satgas Amole III 2015 BKO PT Freeport Indonesia berjaga di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, Sabtu (19/9).

dan ganti aturan main. Sedangkan secara skematik, tetap berada dalam orbit pengaruh kepentingan korporasi-korporasi asing.

Menurut cerita seorang narasumber kepada Perkins, sejak Suharto lengser pada 1998, segalanya malah lebih buruk lagi. Ketika anggaran militer dipangkas dengan perhitungan bahwa para petinggi militer akan bisa dijinakkan, para jenderal tahu ke mana mereka harus meminta bantuan: perusahaan-perusahaan pertambangan dan energi asing.

Model semacam ini menurut Perkins mirip seperti di Nigeria, Kolombia, dan Nikaragua.

Alhasil, selain sumberdaya alam, angkatan bersenjata kita pun berada dalam pengaruh kepentingan-kepentingan korporasi asing. Si nara sumber dengan nama samara Emil ini, kemudian mendesak Perkins untuk menginformasikan hal ini kepada seluruh dunia.

Agaknya, pertemuan dengan

Emil maupun memori pertemuannya dengan seorang petinggi SWEC itulah yang mendorong dirinya menulis kedua buku tersebut.

Masih cerita seputar betapa rapuhnya militer kita dirembesi kepentingan-kepentingan korporasi asing, tak ada berita yang lebih spektakuler selain kelakuan sebuah perusahaan berbasis di New Orleans, Freeport McMoRan Copper and Gold. Betapa tidak. Menurut sebuah artikel The New York Times maupun Associated Press terbitan 30 Desember 2005, para petinggi korporasi tambang dan emas tersebut membayar (baca: Suap) sebesar 20 juta dolar AS kepada para komandan dan unit militer di Papua selama tujuh tahun (yang berarti sejak 1998), sebagai imbalan perlindungan terhadap berbagai fasilitas mereka di sana.

Fakta ini jadi krusial, karena dengan begitu hanya sepertiga dari anggaran untuk angkatan bersenjata Indonesia yang berasal dari anggaran negara. Selebihnya, dikumpulkan dari

sumber “tak resmi” sebagai “biaya perlindungan,” sehingga administrasi militer bisa berjalan secara mandiri, terpisah dari kontrol keuangan pemerintah.

Modus pemberian dana bantuan dalam rangka melayani kepentingan korporasi asing, juga diungkap Perkins terkait sepak-terjang Newmont Minig Corp, yang berbasis di Denver.

Sebagai perusahaan penghasil emas terbesar di dunia, Newmont telah membuang arsenic dan merkuri secara ilegal ke lautan di Teluk Buyat, Jadi rupanya, berdasarkan kesaksian Perkins, keterlibatan dirinya dalam merekomendasikan pembangunan jaringan listrik, jalanan, pelabuhan dan infrastruktur atas bantuan para bandit ekonomi pada 1970-an, ternyata pada perkembangannya ditujukan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan Newmont menjalankan kegiatan penambangan sekaligus meracuni laut.

Intinya, ketika Suharto lengser dan beralih ke pemerintahan sipil di era reformasi, pada perkembangannya justru perusahaan tambang dan energi mengendalikan sistem regulasi Indonesia yang lemah.

Perkins benar adanya. Lahirnya UU No 22/2001 tentang Migas maupun UU No 20/2002 maupun UU No 30/2009 tentang kelistrikan, sepenuhnya berada dalam supervisi kepentingan-kepentingan korporasi asing.

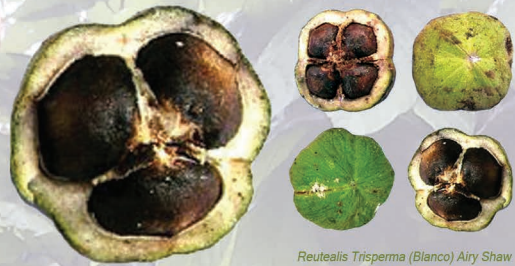
Bahkan UU No 4/2009 tentang Mineral dan Batubara yang pada dasarnya dimaksud untuk melumpuhkan dominasi Freeport dan Newmont melalui kewajiban membangun smelter untuk pemurnian konsentrat, telah dijegal melalui keluarnya PP No/2014, yang tetap memberi hak istimewa kepada kedua korporasi raksasa tersebut. ◦

Hendrajit

PROGRAM PEMANFAATAN KEMIRI SUNAN SEBAGAI BAHAN BAKAR NABATI

Program Kemiri Sunan dikembangkan di Indonesia dalam rangka diversifikasi tanaman bahan baku Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis Biodiesel yang saat ini hanya berbasis kelapa sawit. Pemilihan tanaman Kemiri Sunan didasarkan pada potensi produktivitas minyak yang dapat dihasilkan serta merupakan jenis tanaman non pangan.

Kementerian ESDM telah mulai mendorong pemanfaatan tanaman Kemiri Sunan sebagai bahan baku Biodiesel sejak awal tahun 2014. Pelaksanaan program Kemiri Sunan ini merupakan program lintas sektoral yang melibatkan banyak stakeholder, antara lain dalam hal: penyediaan bahan baku / benih Kemiri Sunan (Kementerian Pertanian), penyediaan lahan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian BUMN serta Pemerintah Daerah) dan terkait pengembangan pengusahaan Kemiri Sunan menjadi Biodiesel (Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi juga Kementerian Keuangan).



Reutealis Trisperma (Blanco) Airy Shaw

Karakteristik Tanaman Kemiri Sunan

- 1 Kemiri Sunan (*Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw*) merupakan tanaman penghasil minyak nabati. Tanaman ini berasal dari Filipina, ditemukan pada daerah dengan ketinggian hingga 1000 m di atas permukaan laut (Maman, 2009). Saat ini telah dikembangkan di Indonesia secara menyebar dan tumbuh baik di Cianjur, Bandung, Sumedang, Majalengka, Garut dan Cirebon.
- 2 Merupakan tanaman konservasi dengan daun lebar, perakaran dalam dan kuat (menahan erosi) dan daya adaptasi luas (100-800 mdpl, curah hujan 1000 - 2500 mm/th) serta tahan terhadap cuaca kering berbatu dan panas. Tepat untuk konservasi (termasuk konservasi lahan bekas tambang), lahan kritis dan reforesting.
- 3 Pohon tinggi (10 - 15 m) dan berjenis kayu keras. Hidup lebih dari 75 tahun. Kanopi yang rapat dan lebar (10 m). Daun lebar yang menyerap CO₂ dan menghasilkan O₂ dalam jumlah besar, tepat untuk carbon trading.
- 4 Akar tunggang-menyimpan air, mencegah longsor. Akar tidak timbul ke atas disekitar batang pohon ideal untuk tumpangsari.
- 5 Mulai berbuah antara 3 - 5 tahun dan mulai mencapai puncak berbuah pada umur 11 tahun. Menghasilkan 300-500 kg biji kering per pohon per tahun dengan kadar minyak 50-56%.
- 6 Rendemen Biodiesel: 88 % dari minyak kasar, dan sisanya berupa gliserol. Efisiensi panas pembakaran minyak cukup tinggi yakni 48-52% hampir mendekati efisiensi kompor elpiji 56%.
- 7 Derivat: bahan baku vernis, cat, bahan pengawet, tinta, sabun, briket, pupuk organik, biopestisida, resin, pelumas, kamps, serta kulit dan sisa perasan (cake) untuk dimanfaatkan sebagai biogas.



- Buah berkembang dari bunga berbentuk malai 9-12 bh/malai
- Dalam satu buah dominan terdapat 3 biji
- Bobot buah 49-65 gram/buah
 - Kulit (62-68%)
 - Tempurung Biji (11-16%)



Perbandingan Komposisi Kandungan Minyak Tanaman Penghasil Bahan Baku Biodiesel

JENIS ASAM LEMAK	KEMIRI SUNAN	MINYAK SAWIT	JARAK PAGAR
Palmitic Acid	10.0	42.5	14.2
Stearic Acid	9.0	0.4	7.0
Oleic Acid	12.0	44.6	44.7
Linoleic Acid	19.0	10.4	32.8
Linolenic Acid	50.0	0.3	0.2
Lain-lain	-	1.6	1.1

Berdasarkan penelitian Forum Biodiesel Indonesia dan ITB (2015), terdapat 53 jenis tanaman yang potensial sebagai tanaman penghasil bahan baku biodiesel.

Perbandingan Kemiri Sunan Dengan Kelapa Sawit

KARAKTERISTIK	KEMIRI SUNAN	KELAPA SAWIT
Produktivitas	10-12 ton/ha	5-6 ton/ha
Usia Produktif	Lebih 75 tahun	25 tahun
Jenis Tanaman	Non Pangan	Pangan
Jenis Akar	Tunggang, dapat menyimpan air	Serabut, menyerap air
Rontok Daun	Rontok, menyuburkan tanah	Tidak rontok
Tumpang Sari	Bisa	Tidak bisa



Benih Kemiri Sunan berumur 4 bulan



Proses Produksi Kemiri Sunan Menjadi Biodiesel



Kemiri Sunan diolah menjadi beberapa komoditas biofuel, seperti biodiesel, minyak mentah, gliserol dan briquet.



Strategi Pengembangan Kemiri Sunan

- Kementerian ESDM telah memasukan Program Kebun Energi Berbasis Kemiri Sunan pada *Quickwins* program pemerintah melalui pengadaan bibit pohon selama 5 Tahun.
- Tahap pertama adalah Program 5 Tahun Pertama Reforestrasi & Investasi. Dalam tahap ini peran Kementerian ESDM adalah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian terkait penanaman Kemiri Sunan di lahan kritis atau lahan bekas pertambangan. Sampai dengan saat ini penanaman Kemiri Sunan telah dilakukan di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung Timur, serta Pulau Sumba.
- Tahap kedua adalah program 25 tahun, dimana Kementerian ESDM menjadi mesin penggerak dalam memanfaatkan hasil Kemiri Sunan untuk dijadikan biodiesel.
- Penyusunan program yang komprehensif, implementatif dan rasional mulai dari aspek hulu (penyediaan lahan, bibit tanaman, budidaya, pascapanen) sampai dengan hilir (pengolahan dan pemanfaatan).
- Penyusunan model bisnis yang dapat diimplementasikan oleh masyarakat, khususnya tentang harga dan pembeli biji. Misalnya dengan menggandeng koperasi atau badan usaha sebagai pembeli biji dari masyarakat langsung melalui unit pengumpul di daerah perdesaan. Koperasi atau badan usaha melakukan pengepresan, kemudian minyaknya bisa dimanfaatkan sebagai minyak nabati murni atau diproses menjadi biodiesel oleh industri biodiesel.

Kegiatan Produksi BBN Kemiri Sunan di Berbagai Daerah



Bantul, DIY.



Flores, NTT.



Majalengka, Jabar.



Lamongan, Jatim.

DKI Jakarta Provinsi Diduga Terkorup Se-Indonesia

Provinsi DKI Jakarta menempati urutan pertama sebagai provinsi diduga terkorup se-Indonesia. Dengan potensi kerugian negara sekitar Rp1,4 triliun.

Rangking itu didapat karena ada dugaan korupsi atau penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di Pemprov DKI yang menyebabkan potensi kerugian negara.

Angka mengagetkan itu dibebaskan Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi dalam diskusi “Evaluasi Pemberantasan korupsi di Pemprov DKI Jakarta” di Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (8/12).

Disampaikan Uchok, peringkat itu berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di tahun 2014 semester pertama.

Provinsi DKI menempati urutan pertama di tahun 2014 dengan 290 kasus. Urutan kedua ditempati Provinsi Aceh dengan potensi kerugian negara mencapai Rp858 miliar dengan 82 kasus, dan ketiga Sumatera Utara dengan 435 kasus

No	Provinsi	Potensi Kerugian negara	Jumlah Kasus	Bentuk USD	Rupiah
1	DKI Jakarta	1.453.303.700,000	290		
2	Aceh	853.303.980,000	82		
3	Sumatera Utara	770.963.640,000	435		
4	Jawa Barat	198.797.480,000	286	USD 9.530.270	123.893.511
5	Sumsel	178.255.840,000	143		
6	Riau	84.716.120,000	28		
7	Jawa Timur	68.725.030,000	50		
8	Banten	57.260.180,000	182		
9	Papua	20.869.020,000	78		
10	Makuku	16.809.960,000	13		
11	Sulawesi Tengah	10.812.170,000	44		
12	Makuku Utara	10.249.370,000	44		
13	Lampung	9.047.550,000	57		
14	Nusa Tenggara Timur	8.767.660,000	62		
15	Kepulauan Riau	5.309.390,000	30		
16	Sulawesi Selatan	5.182.090,000	40		
17	Kalimantan				

dengan potensi kerugian mencapai Rp 770 miliar.

Di posisi keempat provinsi terkorup ditempati Jawa Barat dengan potensi kerugian negara mencapai Rp198 miliar lebih dengan 286 kasus. Menyusul Sumatera Selatan dengan potensi kerugian mencapai Rp178 miliar lebih dengan 143 kasus.

“Inilah wajah provinsi kita se-Indonesia, tidak ada provinsi yang bersih, ini baru masuk ke belanja, belum ke pendapatan,” ujar dia.

Angka potensi kerugian, diakui Uchok, bisa jadi lebih besar. Lantaran BPK hanya mengambil sample sekitar 30 persen saja dari APBD.

/M Vidia Wirawan-Muhammad Kemal Macharani

PDIP: Pasangan Olly-Steven Peroleh 72 Persen Suara

Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Minahasa Tenggara Sem Montolalu mengklaim pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Olly Dondokambey – Steven Kandouw unggul 72 persen.

“Dari data kami, pasangan Olly-Steven yang diusung PDI-P unggul 72 persen atau menang di semua kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara,” kata Sem di Ratahan, Kamis (10/12).

Dirinya menambahkan keunggulan ini merupakan kerja keras dari para kader dan simpatisan PDI-P yang serius memenangkan pasangan Olly-Steven.

“Ini juga menjadi bukti jika pasangan yang diusung oleh partai

kami mendapatkan kepercayaan, makanya kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat,” ujarnya.

Sem pun menuturkan hasil dari Pilkada ini dapat diterima seluruh masyarakat di Minahasa Tenggara dan kembali bersatu dalam kebersamaan.

“Termasuk para pendukung Olly-Steven bisa bersama-sama dengan pendukung calon lainnya dalam kebersamaan sebagai masyarakat Minahasa Tenggara untuk membangun daerah kita,” ujarnya.

Selain itu Sem mengatakan dengan hasil perolehan suara pada Pilkada ini akan menjadi modal partai untuk menghadapi Pilkada di Minahasa Tenggara 2017.

“Perolehan suara ini menjadi



target internal dari PDI-P dalam menghadapi Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara dua tahun depan,” tandasnya. */Nebby-Ant*

Panwas Tangkap Pelaku “Money Politic” di Kota Palu

Panitia Pengawas Pemilu Kota Palu menangkap seorang anggota Tim Sukses dari pasangan calon nomor urut tiga kota setempat. Anggota Tim Sukses itu diketahui bernama Pian, ditangkap sebelumnya oleh warga di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu.

“Warga mengamankan anggota tim sukses dari pasangan calon nomor urut 3, diamankan sekitar pukul 01.30,” kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kota Palu, Darmiati, di kantornya, Jl Swadaya, Kota Palu, pada Rabu (9/12).

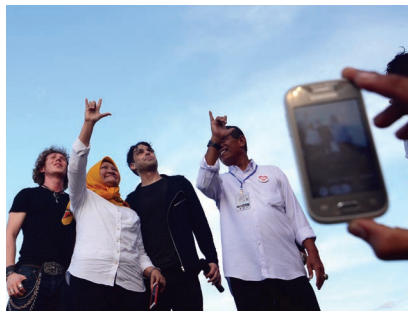
Berdasarkan temuan dan laporan warga, ungkap dia, aparat Polres dan Panwaslu setempat langsung bergerak ke lokasi. Yakni di TPS 09, Desa Palupi.

“Pelaku atas nama Pian,” kata ia menambahkan.

Warga mengamankan pelaku karena bergerak dengan membawa daftar pemilih yang akan diberi uang dan diminta memilih pasangan calon nomor urut tiga. Pelaku juga membawa uang yang akan dibagikan ke pemilih.

“Barang bukti yang diamankan uang sebesar Rp 2 juta 20 ribu, bahan kampanye nomor urut tiga, satu mobil Avanza, serta daftar nama yang akan diberi uang,” kata Darmiati.

Untuk diketahui, Pilkada Kota Palu diikuti empat pasangan calon. Mereka adalah paslon nomor urut 1 Hidayat – Sigit Purnomo Said, paslon nomor urut 2 Hadianto Rasyid – Wiwiek, paslon nomor urut 3 Habsa Yanti Ponulele – Thamrin Samauna. Dan terakhir, yakni pasangan calon nomor urut 4 yakni Mulhanan Tombolotutu – Tahmidy Lasahido. /Ferro Maulana-Soemitro



Ganjar Beri “Wejangan” Kepada Hendi-Ita Untuk Bangun Semarang

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, memberi pesan atau “wejangan” secara khusus kepada pasangan Hendrar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang mengungguli dua kandidat lainnya dalam Pilkada Kota Semarang berdasarkan hasil tabulasi sementara KPU setempat.

“Kota Semarang harus berubah total menjadi ibu kota kebanggaan Provinsi Jateng, sekaligus menjadi kota yang ramah, menyenangkan dan sejuk,” kata Ganjar usai menerima kedatangan Hendi-Ita di rumah dinas gubernur di Semarang, Rabu (9/12) malam.

Pada kesempatan itu, Ganjar meminta Hendi agar menyiapkan agenda yang terencana dan terkonsep secara matang dalam membangun Kota Semarang.

Menurut dia, ketegasan pemimpin diperlukan dalam menjalankan program pembangunan, sehingga dalam pelaksanaannya bisa cepat dan sesuai target.

“Semarang harus bersih, tamannya lebih banyak, trotoar lebih bagus, orang bisa mendapatkan hiburan yang enak dan nyaman, juga koordinasi antara pemkot dengan Pemprov harus lebih bagus,” ujarnya.

Sekarang, kata dia, menjadi momentum bagi Hendi-Ita untuk membuat program pembangunan lima tahun Kota Semarang yang baru dan utuh.

“Ketika menjadi wali kota lalu, Hendi hanya berkesempatan meneruskan program yang dirancang bersama Wali Kota Semarang Soemarmo,” katanya.

Hendi-Ita juga diminta Ganjar untuk menjalin silaturahmi dengan dua pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, yaitu Soemarmo HS-Zuber Safawi dan Sigit Ibnugroho Sarasprono-Agus Sutyoso.

“Kalau bisa telepon malam ini minta waktu untuk bertemu besok dan sampaikan bahwa pilkada sudah



selesai, sehingga mari bersamasama membangun Kota Semarang,” ujarnya.

Ia berpendapat bahwa mengunjungi pasangan calon yang kalah, merupakan pertunjukan politik yang bagus kepada masyarakat.

“Kalau yang didukung bersalaman maka yang di bawah akan berangkul,” ujarnya.

Hendi mengatakan bahwa kedatangannya ke rumah dinas Gubernur Jateng sebagai wujud silaturahmi kepada tokoh-tokoh di Kota Semarang.

“Sebagai sesama kader PDIP, saya juga melaporkan hasil penghitungan sementara Pilkada Kota Semarang,” katanya.

Hendi mengaku akan secepatnya bersilaturahmi ke Soemarmo dan Sigit Ibnugroho.

“Kami ingin Kota Semarang yang kemarin terkotak-kotak kita rangkul kembali,” ujarnya.

Berdasarkan data yang diakses melalui situs KPU dengan alamat pilkada2015.kpu.go.id/kotasemarang, pasangan Hendi-Ita untuk sementara memperoleh 66.603 suara atau 49,92 persen.

Pasangan Soemarmo dan Zuber Safawi memperoleh 42.318 suara atau 31,72 persen, sedangkan pasangan Sigit Ibnugroho-Agus Sutyoso mendapat 24.491 suara atau sekitar 18,36 persen. /Zaenal Arifin-Ant



Arti Perkawanan Bagi Luhut Binsar Pandjaitan

Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal skandal pencatutan namanya dalam negosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (FI).

Senin (12/7) di Istana Negara,

Jokowi tiba-tiba menghampiri pekerja media. Dengan singkat ia menyatakan kemarahannya atas skandal yang menyeret Ketua DPR RI Setya Novanto tersebut.

“Saya enggak apa-apa dikatakan

presiden gila, presiden saraf, presiden koppig, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut wibawa, mencatut, meminta saham 11 persen, itu yang saya tidak mau. Eggak bisa!” ujar Jokowi dengan penegasan lewat



Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) memberikan keterangan terkait dugaan keterlibatannya dalam kisruh kontrak PT Freeport Indonesia, disaksikan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Kahar Muzakir (kanan) di Kantor Menkopolhukam, Jakarta, Jumat (11/12).

menanggapi dengan menyerahkan sepenuhnya pada Majelis Kehormatan Dewan (MKD) yang tengah memproses laporan Sudirman.

Apa yang membuat Jokowi marah dijawab oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Menurut dia, Presiden baru saja membaca transkrip rekaman yang kemudian dijadikan bukti oleh Sudirman dalam laporannya.

“Setelah baca lengkap transkrip rekaman itu memang Presiden marah luar biasa. Kalau dibilang Presiden gila, koppel itu kan sudah sering lah Presiden dihina gitu dan Presiden enggak pernah menunjukkan kemarahannya. Tapi karena dicatut namanya dan dikaitkan dengan pembagian saham, Presiden marah luar biasa,” ujar Teten saat berbincang dengan wartawan di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (7/12).

Reaksi beragam kemudian diutarakan oleh beberapa pihak. Menteri Koordinator Bidang Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan yang langsung menyambut kemarahan Presiden. Wajar Luhut adalah pihak dalam istana yang paling banyak disebut dalam pembicaraan antara Setya, pengusaha Reza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Luhut lantas menantang MKD untuk memeriksa dirinya dalam skandal ini.

“Kita tunggu saja hasil MKD. Saya juga tunggu. Saya sudah minta supaya diundang. Saya mau menjelaskan juga bahwa saya tidak pernah terlibat dalam masalah itu,” kata Luhut esok harinya usai rapat kabinet di Istana Bogor.

Permintaan Luhut akhirnya direspon oleh MKD. Dalam rapat pleno yang dihadiri oleh pimpinan

MKD diputuskan mantan politisi Partai Golkar ini akan dimintai keterangan pada hari Senin (14/12). Keputusan MKD juga akan memanggil Reza Chalid untuk kedua kalinya.

Namun Luhut agaknya tidak sabar menunggu sampai hari Senin. Pada hari Jumat (11/12) malam di Kantor Menko Polhukam Luhut menggelar konferensi pers khusus merespon skandal Freeport. Istimewanya Luhut didampi oleh tiga anggota MKD dari Fraksi Partai Golkar. Yakni Kahar Muzakir, Ridwan Bae dan Adis Kadir.

Luhut tampak marah dalam memberikan keterangannya ke awak media. Ia merasa diperlakukan tidak adil dalam skandal Freeport. Terlebih dengan pemberitaan yang menyebut dirinya paling banyak disebut dalam percakapan yang kemudian menjadi awal pemasalahan di MKD tersebut.

“Itu yang buat saya jadi lama-lama menyatakan kenapa ini enggak adil? Saya ingin orang yang bilang ini tunjukkan salah saya di mana! Saya terganggu, anak saya yang tentara aktif, saya sendiri, istri saya. Saya ingin berhadapan dengan orang-orang yang bilang ini. Jangan negeri ini dirusak berita tak benar!” tegas Luhut.

Luhut menegaskan dirinya pada tanggal 17 Juni 2015 sempat memberikan memo kepada Presiden Jokowi yang isinya menyarankan untuk tidak lagi memperpanjang kontrak PT FI. Sementara rekaman pembicaraan yang direkam oleh Maroef terjadi pada tanggal 8 Juni 2015.

“Kalau dibilang saya ini diminta ngomong ke Pak Jokowi untuk perpanjang Freeport, apa buktinya?” imbuh dia.

Dalam kesempatan ini dia bahkan menyinggung sikapnya dalam kontrak Freeport. Ada lima poin yang disampaikan oleh Luhut. Pertama, kata dia, berpegang teguh pada undang-undang yang berlaku.

“Kedua, izin pertambangan harus memberikan hasil yang lebih besar bagi Indonesia dan memberi

gestur tangannya.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut pencatutan namanya merupakan tindakan yang telah mencoreng lembaga Kepresidenan.

“Ini masalah kepatutan, masalah kepantasan, masalah etika, masalah moralitas, dan itu masalah wibawa negara,” tegasnya.

Sejak skandal ini dibuka oleh Menteri ESDM Sudirman Said baru sekali itu Jokowi memberikan reaksi keras. Sebelumnya Presiden hanya



Presiden Joko Widodo mengungkapkan kemarahan ketika ditanya sejumlah wartawan terkait kasus dugaan pencatutan namanya dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam permintaan saham Freeport, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/12).

kemakmuran yang lebih besar kepada penduduk di provinsi tempat tambang itu berada,” kata Luhut.

Kemudian yang ketiga, adalah izin pertambangan harus dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan sektor pendidikan di provinsi tempat tambang berada.

“Keempat, izin pertambangan harus dapat menciptakan nilai tambah di dalam negeri,” tuturnya.

Terakhir, kata Luhut, Indonesia harus tegas dalam memaksimalkan manfaat kekayaan alamnya bagi rakyat serta tidak tunduk kepada tekanan asing.

Berdasarkan lima prinsip itu, Luhut mengaku setuju dan mendukung lima syarat yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

“Lima syarat itu antara lain pembangunan di Papua, konten lokal, royalti, divestasi saham, dan industri pengolahan,” kata Luhut yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo itu.

Saat menjawab pertanyaan wartawan Luhut yang nampak geram dengan kasus ini mengancam akan melakukan tindakan tegas pada pihak yang mengusik dirinya.

“Saya akan pertimbangkan. Memangnya dia saja yang bikin orang

lain repot? Saya juga bisa bikin dia repot. Ingat, ada batasnya kesabaran orang. Jadi, dari pertanyaan anda, kenapa Anda tidak bereaksi? Jadi terus terang saya masih melihat gerak maju sampai di mana. Tapi kalau sudah keterlaluhan saya pingin tahu dia sampai di mana,” tuturnya dengan nada tegas.

Siapakah pihak yang disebut oleh Luhut tidak jelas benar. Namun sejak skandal ini dibuka oleh Sudirman Said, Luhut tampak berseberangan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Sudirman Said. Misalnya Luhut sempat membantah tindakan pelaporan yang membuat Luhut salah satu pihak yang “repot” atas izin Presiden Jokowi.

Bahkan dengan terang dalam keterangannya Luhut menyebut dua orang yang dilaporkan oleh Sudirman yakni Setya Novanto dan Reza Chalid sebagai sahabatnya.

“Saya pernah ketemu dengan Reza, itu teman lama saya. Tidak ada yang salah saya lakukan. Dan, saya tidak tahu, bahwa demikian. Dan, saya pikir, bahwa saya punya hak untuk berteman dengan siapa saja. Berteman dengan saudara Setya Novanto. Dan dia sebagai Ketua DPR,” ujarnya.

Perkawanan Luhut nampak sekali tidak luntur terhadap Setya dan Reza. Ia bahkan menjadi salah satu

menteri yang menghadiri pernikahan anak Setya beberapa waktu lalu. Saat itu Presiden Jokowi dan Wapres JK memilih untuk tidak hadir.

“Saya pergi ke pernikahan anaknya. Walaupun ada orang yang melarang saya untuk pergi. Tapi, saya dan dia kawan, karena dia banyak membantu hubungan kami bagus antar parlemen dengan pemerintah,” tegasnya.

Ia tau sikapnya datang ke pernikahan Novanto akan menjadi cibiran oleh pihak tertentu. Namun ia tidak ingin mengorbankan persahabatannya dengan Novanto .

“Dan, saya melihat salah apa kalau saya datang? Saya datang ke gereja dan ke resepsinya. Saya ingin mendidik kalian juga. Jangan kalian berkawan kalau hanya senang saja. Kalau dia salah, itu urusan dia. Tapi, soal perkawinan itu adalah perkawanan,” ujarnya.

Ia menambahkan tuduhan permintaan saham yang dilaporkan oleh Sudirman dimana Maroef berperan sebagai saksi dinilai tidak masuk akal.

“Saya enggak pernah meminta saham Freeport. Gini ya adik-adik semua, kalian itu masih muda. Apakah masuk akal orang berikan saham (Freeport) 20 persen dengan siapapun itu? 20 persen itu sama dengan USD 1,8 miliar, mungkin sekarang USD 1,6 miliar,” ujar Luhut.

Menurutnya Maroef tidak memiliki kekuasaan untuk memberikan saham kepada Setya maupun Reza. Pemberian saham baru dapat dilakukan oleh seorang komisaris perusahaan. Menurut keterangannya Luhut mengatakan siap menggelar sidang terbuka di MKD. Ia bahkan akan mengeraahkan apapun untuk menghadapi kasus ini.

“Saya akan pertaruhkan untuk menghadapi itu,” ujarnya. ◻ Wahyu Romadhoni

memberi anda
perspektif
yang berbeda ...




aktual.com
TERHANGAT TERPERCAYA

AKTUAL
MAGAZINE

aktual 

Info Dan Pemasaran :

 081517933376 (Dedy) 081280941009 (Rhiza)

 iklan@aktual.com | marketing@aktual.com | sirkulasi@aktual.com

 www.aktual.com

Lembaga Negara Diadu Domba Freeport

Direktur eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu, mengatakan, mencuatnya permasalahan Freeport tidak bisa dilepaskan dari peran perusahaan Amerika Serikat itu sendiri. Freeport berupaya mencari celah untuk menyukseskan perpanjangan kontrak karya di Papua.

Dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto mencuat di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI atas laporan Menteri ESDM Sudirman Said. Beberapa pihak menilai langkah Sudirman Said tersebut untuk memuluskan kesepakatan yang akan dan atau telah dicapai Kementerian ESDM dengan PT Freeport Indonesia.

“Saya melihat ini Freeport yang main. Jadi lembaga negara, dari Kepresidenan, Wapres, DPR, diadu domba. Ini semua untuk perpanjangan PT Freeport, dengan begitu mereka bisa masuk (diperpanjang),” terang Tom saat dihubungi belum lama ini, Sabtu (12/12).

Menurutnya, keberadaan Freeport di Indonesia ini sebenarnya menjadi pertanyaan rakyat Indonesia. Terlebih, selama ini Freeport terkesan menutupi eksplorasi tambang emas di Papua. Apa saja yang dihasilkan dari pengolahan tambang dan berapa besaran investasi yang ditanamkan di Indonesia.

“Berapa yang kita (Indonesia) dapat dari PT Freeport Indonesia, biji emasnya, bahannya dibawa kesana. Elit politik ini jangan terlalu bodoh juga dong. Kenapa sampai begini,” tegasnya.

Untuk diketahui, Kementerian ESDM dalam keterangan resminya menyatakan bahwa PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia telah menyepakati operasi jangka

panjang dan rencana investasi PTFI. Kesepakatan pada Jumat 9 Oktober 2015 dipertegas melalui surat Nomor 61/SJI/2015.

Sejak ada kesepakatan itu, Pemerintah Indonesia tengah mengembangkan langkah-langkah stimulus ekonomi termasuk didalamnya revisi peraturan pertambangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja.

Pertimbangan besaran investasi dan komitmen yang telah dan sedang berlangsung ditekankan Kementerian ESDM telah memberikan manfaat bagi Indonesia. Selain itu juga pertimbangan meningkatnya nilai royalti, pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, divestasi serta konten lokal.

“Pemerintah telah meyakinkan PT-FI bahwa Pemerintah akan menyetujui perpanjangan operasi pasca 2021 termasuk kepastian hukum dan fiskal yang terdapat pada Kontrak Karya,” jelas keterangan resmi Kementerian ESDM dimaksud.

“Kami sangat senang dengan jaminan kepastian hukum dan fiskal dari Pemerintah Indonesia. Kami berharap melanjutkan kemitraan dan rencana investasi jangka panjang kami untuk memajukan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan perekonomian di Papua,” ucap Chairman of the

Board Freeport-McMoRan Inc, James R. Moffett.

/Wahyu Romadhoni-Soemitro



Pansus Akan Bisa Korek Rahasia Freeport Yang Tak Tersentuh

Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Freeport oleh DPR dinilai oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon adalah langkah yang tepat untuk membongkar kinerja perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut selama berada di Indonesia.

“Jika disetujui (pansus Freeport) ini akan mengorek begitu banyak masalah yang selama ini seolah-olah tidak bisa disentuh, dari mulai kontrak karya satu, kontrak karya dua, termasuk yang rezim sekarang bagaimana penataan hubungan kita dengan Freeport,” ujarnya dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/12).

Menurut politisi Partai Gerindra tersebut pansus juga akan bisa menjadi alat ukur bagaimana implementasi pasal 33 UUD 1945 dipraktekkan di Freeport. Ia meyakini kedepan sumber daya manusia Indonesia dapat mengelola sendiri tambang mineral yang saat ini banyak dikuasai oleh perusahaan asing.

“Hanya dengan royalti satu persen, kemudian naik tiga persen, baru sekarang naiknya tambah lagi sedikit. Itu bukan sebesar-besar kemakmuran rakyat, kita hanya menonton saja disitu, bahkan secara otoritas kadang-kadang otoritas Indonesia pun tidak bisa menyentuh ke area Freeport,” ujarnya.

Seperti diketahui beberapa waktu lalu Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengusulkan pembentukan pansus Freeport. Wacana pembentukan pansus ini belum secara resmi berjalan. Pengumpulan tandatangan anggota dewan sebagai syarat pembentukan Pansus pun belum dilakukan hingga kini.

/Wahyu Romadhoni-M. Zhacky Kusumo

JK: Pilkada Serentak Lebih Efisien

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemilu kepala daerah (Pilkada) serentak lebih efisien karena mengurangi biaya dibandingkan pilkada masing-masing yang selama ini dilaksanakan.

“Lebih efisien dari pada Pilkada masing-masing karena mengurangi biaya, tidak terlalu besar dan tidak melibatkan konflik-konflik. Dulu tiap minggu ada pemilihan,” kata Wapres di Jakarta, Rabu (9/12).

Wapres mengatakan hal tersebut usai membuka “INTOSAI Development Initiative – Asian Organization of Supreme Audit Institutions (IDI ASOSAI) Meeting With SAI Management and Key Stakeholders”.

“Memang aturan begitu. Kalau ada masalah ditunda sampai 21 hari, karena itu keputusan dari PT TUN. Ya bagaimana itu putusan pengadilan,” ucap Kalla.

Pada saat-saat terakhir pelaksanaan Pilkada serentak, lima daerah ditunda pelaksanaannya yaitu Kalimantan Tengah, Simalungun, Siantar, Fakfak, dan Manado.

Penundaan tersebut disebabkan adanya masalah hukum sedangkan kesiapan penyelenggaraan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah hingga 99 persen.

Dengan demikian berarti ada sebanyak 264 provinsi, kota dan kabupaten di seluruh Indonesia yang melaksanakan pilkada serentak pada 9 Desember 2015. /Wahyu Romadhoni-Ant



Jangan Hanya Karena Freeport Kita Berkelahi

Menteri Koordinator Bidang Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk segera menuntaskan skandal pencatutan nama Presiden Joko Widodo dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.

“Saya rasa harus segera dituntaskan, jangan hanya karena Freeport ini kita berkelahi,” ujarnya di hadapan sidang MKD, Jakarta, Senin (14/12).

Lebih lanjut Luhut juga mengatakan MKD tidak terus memolitisir pelaporan yang dilakukan oleh Menteri ESDM Sudirman Said.

“Jangan kita terpecah belah karena ini, masih banyak pekerjaan bangsa ini yang harus kita kerjakan,” ujarnya.

Seperti diketahui atas permintaannya sendiri Luhut bersaksi di MKD. Sejauh ini tidak banyak keterangan baru yang disampaikan oleh Luhut. /Wahyu Romadhoni-Nailin In Sarah

Freeport Alami Guncangan Finansial Hebat

Kisruh soal ‘papa minta saham’ PT Freeport yang menyeret nama Ketua DPR RI Setya Novanto, membongkar semua skenario permainan yang sudah dirancang sejak awal.

Terkait dengan adanya pengajuan atas perubahan Undang-undang Minerba No 4 Tahun 2014 untuk disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan asal Amerika Serikat itu.

“Buat saya, permainan SS (Sudirman Said) sebenarnya membongkar skenario yang sedang dirancang, skenario yang sedang dirancang adalah: ubah dulu UU Minerba untuk disesuaikan (kepentingan Freeport),” kata Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy, dalam acara diskusi di Warung Komando, Jakarta, Minggu (13/12).

Akan tetapi, sambung Ichsan,

terbongkarnya sejumlah skenario permainan yang telah dirancang juga karena Freeport yang mengalami guncangan hebat dalam kinerja keuangannya.

Sehingga, Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin melakukan desakan kepada pemerintah, salah satunya dengan mengeluarkan izin ekspor konsentrat tanpa melakukan pemurnian untuk memperbaiki kondisi keuangan Freeport.

“Buat saya peristiwa 3 pertemuan Freeport dengan SN (Setya Novanto) dan MRC dengan Maroef hanya mengindikasikan bahwa Freeport merasa punya kebutuhan untuk tetap memperoleh izin ekspor konsentrat. Lalu kenapa konsentrat perlu? Kinerja keuangan Freeport ambruk,” tandas dia. /Karel Stefanus Ratulangi-Novrizal Sikumbang

Ketika Ribuan Ikan Mati Mengambang

Kontroversi proyek reklamasi di Teluk Jakarta juga terkait dengan isu lingkungan hidup. Teori penyebab matinya ribuan ikan di Pantai Ancol menjadi bahan tarik-menarik kepentingan berbagai pihak.

Ribuan ekor ikan ditemukan mati mengambang di Pantai Ancol, Jakarta Pusat, pada penghujung November 2015. Kasus matinya ribuan ikan ini kembali mengangkat kontroversi tentang proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta, kali ini dari aspek lingkungan hidup. Berbagai analisis yang bertentangan, tentang penyebab matinya ribuan ikan itu, seolah-olah mewakili konflik antara pihak-pihak yang berbeda pandangan tentang boleh-tidaknya reklamasi Teluk Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan sigap menanggapi kasus ini. Ia menduga matinya ikan-ikan di kawasan Ancol disebabkan oleh pencemaran air yang dibawa oleh aliran sungai, yang bermuara ke Pantai Utara Jakarta. Pencemaran sungai bukan dimulai di kawasan Jakarta, melainkan sudah dari bagian hulunya. "Sedangkan reklamasi terjadi di laut. Jadi kematian ribuan ikan di Ancol tidak ada kaitannya dengan reklamasi Teluk Jakarta," kata Ahok, pada 1 Desember 2015.

Ahok membandingkan peristiwa matinya ikan di Ancol dengan fenomena yang sama, yang terjadi di kolam ikan Epicentrum. Air yang mengisi kolam tersebut berasal dari sungai yang mengalir di sekitarnya, lantaran bentuk kolam memang

didesain mirip dengan sungai. Maka, ikan-ikan di kolam tersebut mati saat volume air sungai yang masuk terlalu banyak, apalagi saat musim hujan mulai melanda Jakarta.

Menurut Ahok, seandainya pencemaran air sungai dimulai di bantaran sungai dekat Jakarta, kemungkinan air sungai yang masuk ke kolam Epicentrum tidak memiliki kandungan racun mematikan. Maka Ahok menduga, pencemaran air sungai yang bermuara di Pantai Utara Jakarta disebabkan pencemaran di bagian hulunya.

Ledakan Populasi Fitoplankton

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah meneliti penyebab kematian ikan-ikan di perairan Pantai Ancol. Peneliti LIPI pada 30 November 2015 menyimpulkan, penyebab ikan-ikan tersebut mati adalah kehabisan oksigen untuk bernapas. Pada saat yang sama, LIPI menemukan ledakan populasi fitoplankton di lokasi ditemukannya ikan-ikan mati tersebut.

"Kadar oksigen yang terlarut di air tersebut sangat rendah, hanya 1,094 mg/liter. Padahal pada keadaan normal kadar oksigennya adalah 4-5 mg/liter," ujar peneliti Oseanografi LIPI Indra Bayu Vimono, dalam keterangan persnya. Menurut Indra, kepadatan fitoplankton yang mencapai satu hingga dua juta sel per liter membuat oksigen dengan cepat tersedot.

Indra mengaku sempat mewawancarai sejumlah pekerja di pantai Ancol, untuk mengetahui

Petugas membersihkan bangkai ikan mati yang terapung di sepanjang Pantai Ancol, Jakarta Utara, Senin (30/11).







kondisi air laut saat kejadian itu. Para pekerja mengatakan, mereka melihat ada perubahan warna air menjadi lebih gelap dan banyak bintik hitam. Kondisi tersebut terlihat sejak dua hari sebelum kematian ikan-ikan secara massal.

Menurut peneliti ini, membludaknya jumlah fitoplankton disebabkan oleh meningkatnya kadar fosfat dan nitrat di kolom air. Namun pada lokasi matinya ikan, kadar zat kimia tersebut sangat rendah. Hal itu mengindikasikan, adanya penyerapan dan pemanfaatan fosfat dan nitrat oleh fitoplankton, sebelum jumlahnya bertambah secara drastis.

“Data fosfat dan nitrat di tepi pantai cenderung tinggi. Kemungkinan ini diakibatkan oleh pembusukan bangkai ikan. Kondisi perairan yang stagnan memungkinkan

pertumbuhan algae menjadi cepat dan penurunan oksigen terjadi secara cepat,” tambahnya.

Mengimbau Warga Tidak Cemas

Pada 2 Desember 2015, Ahok sudah tidak lagi menggunakan “teori limbah dari sungai,” melainkan mengandalkan pada hasil penelitian LIPI. Ahok meminta warga untuk tidak cemas mengenai kematian ikan-ikan di perairan Ancol. Ikan-ikan di wilayah Teluk Jakarta masih tetap bisa dikonsumsi karena matinya ribuan ikan itu tidak disebabkan oleh racun. “Jika mengacu pada LIPI, ya tidak perlu panik karena ikan mati bukan oleh racun, melainkan oleh keberadaan fitoplankton yang menyedot habis kadar oksigen di sana,” tegasnya.

Ahok menjelaskan, ikan-ikan yang mati berasal dari perairan di dekat Pantai Ancol. Sementara ikan di Teluk Jakarta, lokasi dekat reklamasi, diklaim tidak ada satupun yang mati. “Ikan di Teluk Jakarta mati, tidak? Tidak. Yang mati itu yang kecil-kecil di pantai,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta.

Jadi, Ahok menegaskan, reklamasi Pantai Utara Jakarta bukanlah penyebab kematian ikan-ikan di Ancol, seperti yang ramai ditudingkan orang. “Kalian percaya atau tidak dengan LIPI? Ini lembaga ilmu pengetahuan. Jika tidak percaya LIPI, kita mau percaya siapa lagi?” kata Ahok.

Sebelumnya, “teori limbah dari sungai” ini sempat dipertimbangkan oleh Badan Pengelola Lingkungan



Foto atas: Mukri Friatna

Foto kiri: Seorang warga menjaring ikan diantara busa akibat limbah yang menutupi air Kanal Banjir Timur, Cipinang Besar, Jakarta, Jumat (11/12).

Hidup Daerah (BPLHD) Jakarta. BPLHD menyatakan, ada kemungkinan pencemaran limbah industri menjadi penyebab kematian ribuan ikan di kawasan Ancol.

"Kami mau cek dulu dari kualitas air sungai. Bukan tidak mungkin limbah industri, karena lokasi itu merupakan muara dari 13 sungai," kata Kepala BPLHD Jakarta, Junaedi, pada 1 Desember 2015.

Tim BPLHD sudah ke lapangan untuk mengambil sampling air di pantai di Taman Impian Jaya Ancol. Sampling air tersebut dibawa ke laboratorium untuk diuji kualitas dan mutu airnya. Selain tim BPLHD Jakarta, terdapat juga tim dari Puslabfor Kepolisian Daerah Metro Jaya serta Dinas Perikanan dan Kelautan DKI Jakarta, yang akan

membantu penyelidikan atas matinya ribuan ikan di Ancol.

Bagi Junaedi, kejadian matinya ribuan ikan di kawasan Ancol bukanlah fenomena baru. Pada 2014, kejadian serupa sempat terjadi dan penyebabnya adalah pergantian musim. "Musim hujan yang baru datang menyebabkan seluruh sampah dan endapan serta kotoran di darat bergerak ke muara," jelasnya.

Arus yang deras dan tinggi itu menyebabkan turbulensi sungai. Sungai pun menjadi dangkal dan banyak kotoran. Ikan-ikan menjadi kekurangan oksigen. "Inilah yang menyebabkan ikan-ikan mati. Namun, untuk kasus ini, kami akan periksa apakah benar limbah industri atau cuaca yang menjadi penyebab kematian ribuan ikan tersebut," ujar Junaedi.

Para Pengusaha Nakal

Namun, "teori peralihan cuaca" sebagai penyebab matinya ribuan ikan di kawasan Ancol itu dipertanyakan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Walhi berpendapat, ribuan ikan itu mati kekurangan oksigen,

karena tercemar oleh zat pencemar tertentu dengan kadar yang tinggi.

"Kalau disebutkan, kematian ikan-ikan itu karena peralihan cuaca, kecil kemungkinannya. Saya yakin, matinya ikan-ikan itu terjadi karena tercemar atau memang kekurangan oksigen, akibat tingginya zat pencemar tertentu, apalagi di musim hujan ini," kata Manajer Penanganan Bencana Walhi, Mukri Friatna, 1 Desember 2015.

Menurut Mukri, musim hujan sering dijadikan momen bagi para pengusaha nakal untuk membuang limbah mereka ke sungai dan laut. Debit air yang tinggi mudah melarutkan dan mengalirkan zat tercemar, sehingga perusahaan bisa menutupi kenakalan tersebut. "Dari investigasi kami selama ini di hampir seluruh sungai di Indonesia, pengusaha nakal sering membuang limbah berbahaya mereka terutama di musim hujan dan musim tanam sebagai kamuflase," tegasnya.

Menurut Walhi, terdapat sekitar 600 industri di Jakarta yang tidak memiliki analisis dampak lingkungan. Maka, ada kemungkinan kematian ribuan ikan itu disebabkan oleh pencemaran limbah industri. "Terutama ini bulan Desember, di mana aktivitas produksi perusahaan pasti sedang meningkat menjelang Hari Raya Natal," jelas Mukri.

Mukri juga mempertanyakan "teori BPLHD" bahwa kematian ribuan ikan itu adalah kejadian rutin tahunan akibat peralihan cuaca. Sebab, jika memang demikian, mengapa tidak ada perbaikan atau pengawasan yang dilakukan BPLHD Jakarta, untuk mencegah kasus kematian ikan kembali terulang.

Mukri meminta BPLHD Jakarta untuk mengarahkan para pelaku industri, untuk membuang limbah ke dalam satu Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu. Limbah cair bisa dibuang ke perairan selama sesuai dengan baku mutu yang ada. "Sayang, akibat biaya mahal, tidak sedikit perusahaan yang tidak mematuhi peraturan tersebut," tegas Mukri. • Satrio Arismunandar



Nahas di Teluk Jakarta

Ribuan ikan mati bergelimpangan di sepanjang Pantai Ancol, Jakarta Utara, akhir November lalu (30/11). Dinas Kelautan, Peternakan, dan Ketahanan Pangan menyebut jumlah ikan mati mencapai lima kuintal.

Ini bukan kali pertama. Dua tahun sebelumnya kematian massal ikan sudah pernah terjadi. Tapi pihak pengelola Ancol belum menyelidiki. Anggapan mereka, itu hanya siklus dua tahunan belaka. Di hari Senin itu, penyebab kematian massal ikan di Teluk Jakarta masih simpang siur.

Sampai 10 hari kemudian. Uji laboratorium Pemprov DKI temukan dua penyebab. Pertama: ikan mati akibat kekurangan oksigen dalam air. Kedua: tingginya kandungan timah di perairan.

Menurunnya kadar oksigen disebut karena perubahan cuaca ekstrem. Sehingga suhu air berubah drastis di permukaan dan di dasar laut.

Sebuah kapal melintasi lokasi yang akan dibangun Pulau G atau Pluit City dalam Reklamasi Teluk Jakarta di Pluit, Jakarta, Kamis (5/11).





Sedangkan faktor kedua, kandungan timah yang tinggi bercampur lumpur yang mengendap di sungai selama kemarau. Saat musim penghujan, lumpur-lumpur beracun itu terbawa air sampai Teluk Jakarta.

"Air laut yang tercemar menyebabkan ikan mati," kata Kepala Dinas Kelautan, Peternakan, dan Ketahanan Pangan DKI, Darjamuni, di Balai Kota DKI, 10 Desember lalu.

Sebelum Pemprov DKI mengumumkan itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sudah bergerak lebih cepat. Tanggal 3 Desember, LIPI sudah umumkan hasil kajian cepat para penelitiannya dari Pusat Penelitian Oseanografi di Ancol. Menurut LIPI, kematian ikan disebabkan menipisnya oksigen akibat meledaknya populasi (booming) fitoplankton dari jenis *Coscinodiscus* sp. Dipicu meningkatnya kadar fosfat dan nitrat di kolom air.

Hasil analisis sampel air laut dari tujuh titik sampling pada 1 Desember, menunjukkan kadar oksigen di air sangat rendah. Hanya 0,765 ml/L atau 1,094 mg/L. Atau turun 75 persen lebih dari normalnya kadar oksigen di air sebesar 4-5 mg/liter.

Indra Bayu Vimono dari LIPI menuturkan, pertumbuhan algae secara cepat dimungkinkan oleh kondisi air di Pantai Ancol yang stagnan, dengan hanya satu pintu air di arah laut. "Kondisi perairan yang stagnan memungkinkan pertumbuhan algae menjadi cepat dan penurunan oksigen terjadi secara cepat dalam skala lokal," kata dia.

Tapi LIPI ternyata masih kalah cepat. Sebelum mereka umumkan hasil kajian, ada lagi yang lebih cepat umumkan 'hasil'. Tak lain dan tak bukan, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Pada 1 Desember, di hari peneliti Oseanografi LIPI baru mengambil sampel air, Ahok sudah angkat bicara soal penyebab matinya ikan di Ancol. Dia mengklaim mengutip temuan LIPI. Namun yang dia sampaikan jauh dari penjelasan 'njlimet'



Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberikan keterangan kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta, Rabu (25/11).

penelitian. Maklum dia gubernur, bukan peneliti.

Kendati demikian, dia berani keluaran bantahan. Pertama yang disampaikan ke wartawan adalah bantahan. Ya, bantahan untuk spekulasi bahwa ikan mati akibat Proyek Reklamasi di Teluk Jakarta. Diketahui sebagai pembela terdepan proyek reklamasi Teluk Jakarta, Ahok dengan yakin mengatakan, "Enggak ada hubungannya (reklamasi dengan

matinya ikan di Ancol)."

Ketimbang salahkan proyek reklamasi, Ahok sepertinya lebih suka menyalahkan perusahaan-perusahaan yang ditudingnya membuang limbah ke sungai dan terbawa ke laut saat hujan. Ancaman 'gagah' yang seperti biasa dilontarkannya jika ada masalah pun keluar dari mulutnya. Perusahaan yang membuang limbah ke sungai bakal diselidiki dan diganjar sanksi. "Sanksi terberat pabriknya ditutup," kata dia.

Beres? Nanti dulu. Sekilas, apa yang disampaikan Ahok memang

tidak sepenuhnya salah. Memang benar ada pencemaran berat yang menyebabkan ikan mati. Limbah industri patut dipersalahkan. Begitu juga dengan *booming* algae yang menyebabkan ikan mati kehabisan nafas. Namun Ahok seperti menutupi hasil kajian LIPI secara lebih lengkap. Jika dibaca lagi, LIPI jelas menyebut cepatnya pertumbuhan algae didorong kondisi air Pantai Ancol yang stagnan alias minim arus.

Degradasi Lingkungan Akibat Daratan Menerabas Laut

Dalam buku terbitan Balitbang KKP tahun 2014 berjudul 'Dinamika Teluk Jakarta: Analisis Prediksi Dampak Pembangunan Tanggul Laut Jakarta' disebutkan sejumlah penelitian menemukan Teluk Jakarta telah alami degradasi lingkungan akibat masuknya berbagai kegiatan di daratan yang semakin tinggi dari waktu ke waktu.

Wardianto di tahun 2004 menyebut degradasi Teluk Jakarta bisa diindikasikan dengan *booming*-nya fitoplankton seperti yang terjadi di Pantai Ancol dan mengakibatkan ikan mati lemas kehabisan oksigen. Juga penurunan kualitas hidup kerang hijau dan degradasi ekosistem terumbu karang (Estradivarti, 2007).

Disebutkan bahwa Teluk Jakarta sebagai tempat bermuara 13 sungai yang mengalir melalui berbagai kawasan industri dan pemukiman, termasuk dalam kawasan yang relatif tertutup dan sangat rentan terhadap berbagai tekanan ekologis yang membahayakan kehidupan masyarakat sekitar.

Salah satu materi yang dapat membahayakan adalah logam berat yang sulit lepas saat masuk dalam tubuh organisme. Seperti timbal (Pb), kadmium (Cd) tembaga (Cu), nikel (Ni) dan seng (Zn). Hasil penelitian KKP menunjukkan kondisi hidro-oseanografi perairan Teluk Jakarta sebagian besar dipengaruhi oleh aktivitas dari daratan, seperti aktifitas pelabuhan dan industri.

Kembali pada hasil uji laboratorium oseanografi LIPI,

booming fitoplankton yang jadi penyebab matinya ikan didorong oleh kondisi perairan yang stagnan.

Dr. Widodo S Pranowo dari Balitbang KKP mengungkapkan arus di Teluk Jakarta seluas 514 kilometer persegi hanya bergerak ketika terjadi perbedaan pasang dan surut saja. Dalam satu hari di Teluk Jakarta yang merupakan perairan dangkal, terjadi satu kali pasang dan satu kali surut dengan periode pasang surut sekitar 24 jam 50 menit. Alhasil alirannya sangat pelan.

Pergerakan arus hanya karena perbedaan permukaan laut akibat pasang surut antara yang di mulut teluk dengan yang di dalam teluk. Di mulut teluk itu perbatasan dengan Laut Jawa. Jadi arus di Teluk Jakarta relatif lebih lamban dibanding Laut Jawa," ujar dia.

Berbeda dengan arus di Laut Jawa yang kencang karena juga dipengaruhi dorongan angin dan sirkulasi dari laut lain, seperti dari laut Selat Karimata dan Selat Makassar.

Dengan kondisi Teluk Jakarta yang seperti itu, lanjut Widodo, bisa dibayangkan bakal seperti apa Teluk Jakarta jika berdiri proyek reklamasi ataupun Giant Sea Wall (GSW). Yang otomatis akan membuat arus lebih terhalang dan semakin melemah.

Mengenai persoalan lemahnya arus air, pakar oseanografi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) DR Alan Effendy Koropitan ikut beri tanggapan. Kata dia, arus air di Ancol ataupun di Teluk Jakarta keseluruhan memang lemah. Padahal arus air berguna untuk 'mencuci' air yang tercemar. Tapi karena arusnya lemah, material yang menumpuk di Teluk Jakarta tidak terdistribusi dengan baik. "Limbah jadi ngumpul aja ngga keluar terdorong arus," ucap dia kepada Aktual, Minggu (13/12).

Alan juga berpendapat fenomena itu sekaligus menandakan kondisi Teluk Jakarta sudah melebihi daya dukungnya. Sejak pembangunan dari tahun 70-an, tutur Alan, konversi lahan besar-besaran terjadi di Teluk Jakarta. Dari pantauan satelit, sejak

tahun 70-an dibanding tahun 2004 sudah ada 80 persen lahan hijau di Teluk Jakarta yang dikonversi jadi pemukiman ataupun kepentingan komersil lainnya. Kondisi itu ikut diperparah dengan limbah industri dan rumah tangga yang dibuang industri ke sungai. "Parahnya lagi DKI tidak memiliki instalasi pengolahan limbah yang signifikan. Padahal sudah berapa gubernur berganti di Jakarta," kata dia.

Apa yang disampaikan Alan diperkuat hasil penelitian Peorbandono di 2014 yang menyebut input sedimen yang terjadi di Teluk Jakarta meningkat 2,5-35 m³/detik/bulan karena perubahan iklim dan perubahan pada fungsi atau jenis tutupan lahan.

Alhasil, kata Alan, kematian massal ikan di Teluk Jakarta bukan hal baru. Dari buku terbitan KKP tahun 2014 berjudul Dinamika Teluk Jakarta: Analisis Prediksi Dampak Pembangunan Tanggul Laut Jakarta (Jakarta Giant Sea Wall) disebutkan, penelitian Hendiarti di tahun 2011, menunjukkan konsentrasi sedimen dan klorofil dalam periode tahunan di tiga sungai besar yang melalui Jakarta: Ciliwung, Cisadane dan Citarum, berada pada level tertinggi. Sungai Citarum dan Sungai Cikarang tercatat memberi kontribusi lebih dalam penyebaran polutan di Teluk Jakarta.

Dengan berbagai faktor yang saling melengkapi merusak Teluk Jakarta itu, Alan mengaku heran dengan pernyataan Ahok yang mengatakan reklamasi tidak ada hubungannya dengan kematian ikan dan justru akan memperbaiki kondisi Teluk Jakarta yang terlanjur merana. Padahal arus di Teluk Jakarta yang sudah lemah, bakal menjadi semakin lemah dengan adanya proyek reklamasi. Membuat waktu 'pencucian' (retensi) material limbah yang menumpuk semakin lamban. "Sekarang saja sudah lamban, dengan adanya reklamasi arus akan semakin terhambat. Jadi tambah lama proses 'pencuciannya'. Ini fakta yang kita khawatirkan. Tapi Pemprov DKI abaikan ini," ucap dia heran. ◦ M Vidia Wirawan



Membaca Sasaran Strategis Tiongkok Melalui Pembangunan Pulau-Pulau Buatan di Teluk Jakarta

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk memberi izin Proyek Reklamasi pulau di Teluk Jakarta kepada anak perusahaan PT Agung Podomoro, yaitu PT Muara Wisesa Samudera, memang bisa jadi perkara serius.

Sebab berdasarkan riset dan pengkajian geopolitik, ada indikasi kuat bahwa adanya keterlibatan para Taipan yang dikenal dengan julukan “9 Naga” untuk menguasai kawasan Jakarta dan sekitarnya secara geopolitik. Sehingga pada perkembangannya kemudian, akan membuka ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat “China Perantauan” (*Overseas China*) untuk semakin menguatkan basis ekonomi dan sosial-budayanya di kawasan Jakarta dan sekitarnya.

Sehingga masuk akal jika banyak kalangan gusar bahwa kebijakan Ahok memberikan izin untuk Proyek Reklamasi Teluk Jakarta, pada gilirannya akan dijadikan “pintu masuk” untuk membangun 17 pulau buatan, sebagai landasan untuk mengembangkan sebuah mega proyek yang bernama Giant Sea Wall.

Kalau menelisik rencana strategis Tiongkok untuk menguasai beberapa wilayah strategis di kawasan Asia Tenggara, rasanya kekhawatiran banyak kalangan terhadap reklamasi pulau buatan di Teluk Jakarta sungguh sangat beralasan.

Strategi Tiongkok untuk membangun pulau-pulau buatan

di beberapa wilayah strategis tak lepas dari tujuan utama Tiongkok itu sendiri untuk menguasai beberapa wilayah di sekitar Laut Cina Selatan dan Selat Malaka.

Mari kita mulai dengan menelisik Pulau Natuna. Tatkala Tiongkok kembali memasukkan wilayah perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau ke dalam peta wilayahnya (Antara, 12 Maret 2014), maka langkah Negeri Paman Mao ibarat mendendangkan lagu lawas yang diputar ulang. Kenapa demikian?

Sejak era Bung Karno hingga Pak Harto (Orde Baru) bibit-bibit konflik atas landas kontinen di Laut Cina Selatan memang sudah ada, akan tetapi tidak sempat mencuat karena dinilai para diplomat berhasil meyakinkan, bahwa tidak ada masalah kemaritiman antara Tiongkok dengan Indonesia.

Tak dapat dipungkiri. Jika merujuk peta Tiongkok 1947, sebenarnya terlihat sembilan garis putus-putus berbentuk lidah meliputi wilayah Pulau Hainan sampai ke pantai Kalimantan, juga mencakup Teluk Tonkin, Kepulauan Paracel dan Spratly. Demikian juga dekade 1995-an, berdasarkan peta Tiongkok tersebut semakin terlihat bahwa ladang gas Natuna diakui masuk dalam lingkup teritorialnya, kendati berjarak 1000-an mil di selatan Tiongkok.

Tiongkok memang (pernah dan sudah) mengklaim sebagian Laut Natuna sampai ke perairan Pulau Bangka dan 20 mil dari Kalimantan

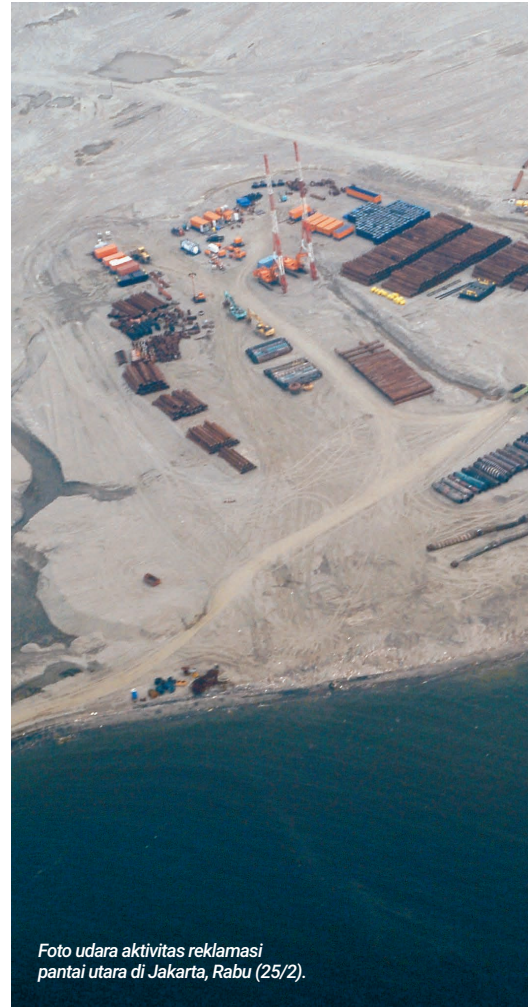


Foto udara aktivitas reklamasi pantai utara di Jakarta, Rabu (25/2).

Barat serta sekeliling Vietnam. Namun sekali lagi, persoalan tersebut tak sempat muncul di permukaan. Anggapan berkembang bahwa konflik landas kontinen antara Tiongkok versus Indonesia hanya “ditunda” belaka.

Pertanyaannya kemudian, dibenamnya api konflik di atas selama sekian dekade, apakah karena faktor kepiawaian para diplomat kedua negara, atau karena kuatnya pengaruh kepemimpinan Indonesia saat itu, sehingga Tiongkok segan (menunda) berseteru?

Sejarah mencatat, bahwa ambisi Tiongkok mencaplok wilayah Kepulauan Spratly dan Paracel seluas 200 mil ke dalam Undang-Undang (UU) Maritimnya yang baru menuai protes dari DPR-RI dalam Sidang



AIPO (Asian Inter-Parliamentary Organization), bulan September 1996 di Phuket, Thailand. Parlemen Indonesia saat itu memiliki data, bahwa masih ada sengketa antara Tiongkok versus beberapa negara ASEAN. UU Maritim Tiongkok dinilai sebagai klaim sepihak.

Di satu sisi, Tiongkok menolak UNCLOS 1982 dengan pernyataan “kedaulatan yang tak terbantahkan atas Laut Cina Selatan”. Sedangkan Taiwan, Vietnam, Philipina, Malaysia, dan Brunei di sisi lain, ternyata memiliki tuntutan sama justru merujuk Hukum Internasional terhadap obyek yang diklaim oleh Tiongkok. Fenomena ini ibarat sisi-sisi pada sekeping mata uang, saling bertolak belakang di permukaan dengan punggung menyatu (terkait)

pada obyek yang sama, yakni Spratly dan Paracel.

Sebelum melangkah jauh, sekilas digambarkan *mapping* sengketa landas kontinen Spratly dan Paracel di Laut Cina Selatan antara Negeri Tirai Bambu versus beberapa negara ASEAN. Konflik tersebut meliputi: Tiongkok versus - Taiwan, Tiongkok – Vietnam, Tiongkok – Philipina, Tiongkok – Malaysia, Tiongkok – Brunei, meskipun terdapat juga konflik yang tidak melulu berhadapan dengan Tiongkok, misalnya konflik antara Philipina - Malaysia, Philipina - Taiwan, Malaysia - Vietnam, Philipina - Vietnam, Malaysia - Brunei, dll tetapi yang paling aktual ialah Tiongkok melawan Indonesia!

Maka itu, klaim Paman Mao atas perairan Natuna tak boleh dianggap

sepele.

Langkah kontroversi Tiongkok mengklaim perairan Natuna, kemungkinan besar telah diperhitungkan “untung rugi”-nya. Ibarat menghitung langkah perang, Paman Mao seakan berani menghadapi keadaan terburuk karena langkah tadi bermakna bahwa ia telah bersiap dan menghitung tambahan “daftar lawan”-nya di Laut Cina Selatan.

Mengapa demikian, sebaiknya kita *breakdown* dahulu latar belakang kenapa Tiongkok bersikeras atas “kedaulatan tak terbantahkan” di Laut Cina Selatan dan sekitarnya. Beberapa dokumen dan serangkaian diskusi dengan kawan-kawan di Global Future Institute (GFI), Jakarta, menyimpulkan beberapa pointers sebagai berikut:

Pertama, selain nama perairan itu identik seolah-olah ia sebagai “pemilik” tunggal, juga Laut Cina merupakan jalur strategis bagi pelayaran internasional dari Lautan Pasifik menuju Lautan Hindia.

Kedua, ia menyadari bahwa perairan tersebut adalah urat nadi Tiongkok ---seperti Selat Malaka bagi Singapura--- karena lebih 80% ekspor impor berbagai komoditi dari dan menuju Negeri Tirai Bambu, bahkan skema “*energy security*” yang dijalankan mutlak harus melalui jalur transportasi laut tersebut.

Ketiga, implementasi *String of Pearls*. Tak boleh disangkal, inilah strategi handal Paman Mao di perairan dalam rangka mengawal serta mengamankan “*energy security*”-nya. Dimana cakupan wilayah atas strategi dimaksud ialah bentangan perairan mulai dari Lautan Pasifik cq Laut Cina (Selatan dan Timur), dimana titiknya dimulai dari pelabuhan Hongkong – Laut Cina – (melewati perairan Natuna) ke Selat Malaka – Laut Andaman – Teluk Benggala – Laut Arab – Teluk Oman (dan Selat Hormuz) – Teluk Aden – Laut Merah. Dimana jika ditarik garis memang membentuk untaian kalung (*string of pearls*).

Keempat, tampaknya pecahnya



Uni Soviet menginspirasi Negeri Tirai Bambu untuk konsisten dan berkomitmen terhadap “Sosialisme Bercirikan Cina”. Artinya sistem perekonomian boleh “bebas” (kapitalisme), tetapi kontrol politik tetap dalam kendali Partai Komunis Cina (PKC).

Menurut Prof Wang Gung Wu (Seminar CSIS, 16 Nopember 1997), selain Tiongkok berpenduduk besar, ada sumberdaya alam (SDA), memiliki kebudayaan dan tradisi tua di dunia, semenjak reformasi mengalami masa transformasi dan konvergensi ke arah kapitalisme yang akhirnya melahirkan konsep “*One Country and Two System*”, yaitu sistem negara dengan elaborasi ideologi antara sosialisme dan kapitalisme hidup berdampingan.

Salah satu butiran diksusi di GFI, Jakarta, menyatakan bahwa konsep sosialisme berciri Tiongkok yang dilandasi *One Country and Two System*, titik beratnya ialah swasta di satu sisi, sementara di sisi lain peran negara diperkecil. Artinya para pengusaha silakan di depan membuka ladang-ladang usaha di luar negara, namun ada *back up* militer (negara) di belakang.

Apakah *Overseas Chinese* (OC) bagian dari konsep ini? Memang masih perlu penelitian secara khusus. Begitu pun, kebijakan Gubernur Ahok mengizinkan reklamasi pulau-pulau buatan kiranya perlu diwaspadai aspek-aspek politik dan keamanannya? Karena pada kenyataannya, para taipan rantau yang saat ini tersebar di pelbagai kawasan dunia, termasuk di Asia Tenggara, merupakan penyangga ekonomi Tiongkok saat ini. Sekitar 60 persen bisnis di Tiongkok berasal dari para taipan rantau itu. Sehingga cadangan devisa Tiongkok saat ini mencapai 3 triliun dolar Amerika Serikat. Cukup fantastis bukan?

Makanya asumsi yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara Cina Daratan (Beijing) dengan kelompok OC perlu dikaji ulang kembali. Niscaya mereka memiliki *link up* dan keterkaitan erat,

bahkan Taiwan sekalipun. Minimal soal tradisi serta budaya.

Kelima, potensi SDA yang berlimpah di perairan Tiongkok. Tak boleh dielak, perairan ini selain luasnya mencapai 3,5 juta kilometer persegi, membentang dari barat daya Singapura, ke timur laut sampai ke arah Selat Taiwan di daratan Tiongkok, juga potensi SDA kawasan ini sekitar 213 miliar barel. Luar biasa. Ditambah penelitian tim perminyakan di Beijing setelah menemukan sumber gas sebesar 25 triliun meter kubik gas alam. “Ini yang sudah terbukti keberadaannya”.

Keenam, semakin besarnya militer Tiongkok. Tak boleh dipungkiri. Dari berbagai informasi yang dihimpun Aktual, The People’s Liberation Army Navy (PLAN), yang merupakan bagian integral dari People’s Liberation Army ini ternyata kekuatannya lumayan hebat juga.

Saat ini, PLAN memiliki 250.000 tentara yang didalamnya termasuk 35.000 tentara Coastal Defense Force (Pasukan Pertahanan Lepas Pantai). Sedangkan infantry mariner lautnya berjumlah 56.000 tentara. Belum lagi termasuk 56.000 Aviation Naval Air (Pasukan Unit Udara Angkatan Laut).

Bukan itu saja. Jumlah kapal selam milik PLAN pun boleh dibilang cukup fantastis. Saat ini Cina memiliki 100 unit kapal selam. Kemajuan yang sangat pesat mengingat sebelumnya PLAN hanya memiliki 35 unit kapal selam. Sedangkan kapal pembawa rudal juga meningkat dari 20 menjadi 100 buah.

Kapiten So Bing Kong, Cina Rantau Angkatan Pertama di Indonesia

Untuk membaca keterkaitan antara jaringan Cina Rantau dengan para penguasa negeri Tirai Bambu di Beijing, marilah kita buka kembali mata rantai sejarah keterlibatan Tiongkok di kawasan ini, yang sepertinya sudah dimulai sejak awal abad ke-17. Kalau sekarang kita kerap mendengar sepak-terjang Ciputra, Edward Suryajaya, Anthony Salim, Eka Cipta Wijaya, Budi dan Michael Hartono, Hartati Murdaya Po, namun

pada awal abad ke-17 rasa-rasanya kita masih asing dengan sosok bernama So Bing Kong.

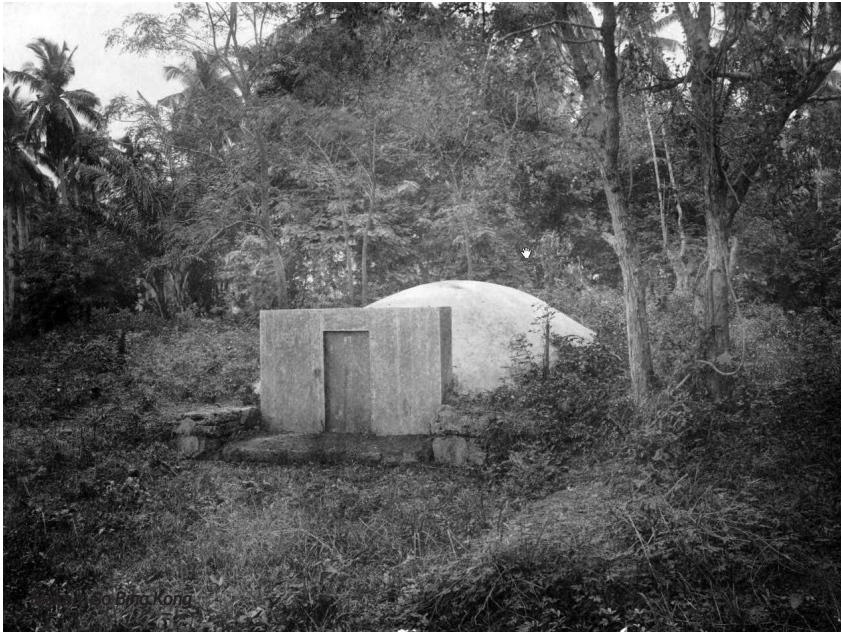
Padahal, selain dia ini merupakan leluhur para konglomerat Tiongkok yang sekarang ini kaya raya di Indonesia, So Bing Kong merupakan sosok yang membangun pondasi ekonomi dan sosial-budaya masyarakat Tionghoa di kawasan Jakarta dan sekitarnya.

Ketika itu, Jan Pieter Zoen Coen, Gubernur Jenderal Belanda pertama di Batavia (sekarang Jakarta), punya rencana akbar untuk menggelar kerja pembangunan kota Batavia. Maka, Gubernur Jenderal Coen mengajak kelompok masyarakat Tionghoa sebagai “mitra kerja” penguasa dalam mega proyek tersebut. Alhasil, kelompok Cina Rantau di Batavia ini kemudian menjadi mitra kerja (kontraktor tunggal) andalan pemerintahan kolonial Belanda di Batavia.

Bukan itu saja. So Bing Kong, kemudian diberi kedudukan sebagai Kapitan, yang mengepaloi orang-orang Tionghoa yang didudukkan dalam Bank Van Scheppen (Dewan Para Hakim). Sebuah posisi kunci bagi Bing Kong dan sekaligus posisi yang mudah dikontrol oleh Gubernur Jenderal Coen.

Singkat cerita, melalui peran Bing Kong, warga masyarakat Tionghoa dikerahkan untuk membantu obsesi-obsesi Coen membangun Batavia. Melalui kontrol terkendali dan terstruktur ini, Coen dengan leluasa melakukan kerjasama di berbagai pekerjaan pembangunan Batavia dengan para pekerja ahli yang didominasi orang-orang Tionghoa. Termasuk melakukan upaya pengembangan usaha perdagangan di Batavia. Mulai dari perdagangan hasil bumi, bisnis candu, hingga pengelolaan rumah-rumah judi dan pemungutan pajak retribusi bagi perahu-perahu yang melewati kanal-kanal tertentu di Batavia.

Tak pelak lagi, bibit-bibit penguasaan orang-orang Tionghoa sebagai kekuatan ekonomi yang strategis sudah mulai tertanam,



yang mungkin tak terbayangkan oleh Coen, bahwa tiga abad kemudian di abad ke 21 sekarang ini, bukan saja para konglomerat Tionghoa merajai perekonomian nasional kita, bahkan salah satu warga Tionghoa, berhasil menduduki jabatan sebagai Gubernur.

Kedigdayaan warga Cina Rantau di Batavia memang sudah terlihat ketika berbagai arsip yang sudah berhasil diakses oleh para sejarawan membuktikan bahwa warga Cina Rantau ini merupakan pembayar pajak yang pertama. *Hoofgeld* (pajak kepala) yang jumlahnya cukup besar, hingga tahun 1630 telah menyumbangkan separuh pendapatan bagi kota Batavia.

Dana besar yang dikelola Kompeni Belanda dan meningkatnya kemakmuran materi Batavia, selanjutnya menarik lebih banyak orang dari Tiongkok mengalir berdatangan. Kalau pada 1619 tercatat baru sekitar 400 penduduk, maka pada 1628 telah melonjak menjadi 3000.

Inilah *success story* Coen membangun Batavia dengan berkongsi bersama Bing Kong, Ketua Masyarakat Tionghoa di Batavia. Bahkan, sejak fase inilah, kolusi pemerintahan kolonial Belanda dan

para pengusaha “Cina Rantau” di Batavia mulai terajut.

Bahkan di era Gubernur Jenderal Jaques Speck, pengganti Coen, keluar kebijakan bahwa para pejabat militer atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan penghasilan sampingan, kemudian diciptakan suatu bentuk kerjasama dengan para pengusaha Tionghoa yang kemudian mengarah pada upaya saling menguntungkan “kantong” kedua belah pihak.

Bisa dibayangkan, betapa segala urusan dan seluk-beluk perekonomian kemudian diserahkan sepenuhnya kepada para pengusaha Tionghoa. Bahkan termasuk dalam pengelolaan pemungutan pajak dan usaha perdagangan lainnya. Seperti saya katakan tadi, orang Tionghoa kemudian menjadi kontraktor tunggal.

Dengan langkah ini, pihak pemerintah kolonial Belanda di Batavia hanya menerima pembagian hasil keuntungan yang didapat dari laporan pihak pengusaha Tionghoa. Dan angka inilah yang dilaporkan ke pemerintah pusat di Belanda. Padahal nyatanya, angka yang dilaporkan telah diolah sedemikian rupa (secara fiktif dan manipulatif) sehingga menyisakan pemasukan

bagi kantong-kantong pribadi para pejabat di Batavia.

Inilah cikal bakal kolusi pengusaha dan penguasa. Yang pada perkembangannya kemudian, hal ini bukan sekadar sebuah praktik yang sifatnya accidental, melainkan lambat-laun jadi sistem.

Betapa tidak. Melalui kolusi yang menjejalkan para oknum pejabat Batavia ini, orang-orang Tionghoa semakin dipelihara, disayang dan bahkan dihormati sebagai warga istimewa Batavia.

Sehingga sebagai sistem hal ini terus berlanjut di era pasca Bing Kong. Tiga kapiten setelah Bing Kong, adalah Lim Lacco, Phoa Bingan dan Goansi Kwa. Mereka semua turut duduk di Majelis terhormat Bank Van Scheppen untuk mewakili bangsa mereka.

Para kapiten Tionghoa ini memiliki kekuasaan terhadap wilayah-wilayah tertentu dan kian memantapkan posisinya sebagai perpanjangan tangan penguasa Batavia (Belanda).

Sejak JP Coen hingga jelang pertengahan abad ke 18, keterlibatan masyarakat Tionghoa dalam program pembangunan Batavia menjadi agresif. Sehingga kolusi penguasa (Belanda) dan pengusaha Tionghoa tumbuh subur jadi landasan bangunan budaya perdagangan di tanah Jawa.

Suburnya kolusi dimungkinkan karena para pejabat Belanda dalam kondisi minim pendapatan. Sebagai Maskapai Dagang Belanda (VOC), mereka hanya menerima uang pas-pasan. Sehingga dalam usaha meningkatkan pendapatan pribadi, mereka terpaksa membina hubungan kerja dengan para pedagang Tionghoa.

Dalam kasus pengelolaan jalur transportasi (tol) sungai Ciliwung, Gubernur Jenderal Speck sengaja menunjuk sepenuhnya pengusaha swasta Tionghoa (via Bing Kong) untuk bertindak sebagai pengelola tunggal.

Untuk itu pihak pengusaha Tionghoa dikenakan wajib setor



secara resmi masuk pada kas pemerintahannya. Para pejabat tinggi pemerintah Belanda di Batavia juga menerima semacam upeti sebagai imbalan jasa penunjukan pengusaha Tionghoa sebagai kontraktor tunggal.

Alhasil, berlawanan dengan harapan semula, pihak kolonial Belanda untuk menggandeng Tionghoa dengan keyakinan akan bisa mengontrolnya, justru sebaliknya. Karena setelah itu, justru ekonomi-lah yang jadi panglima.

Maka, justru di sinilah bahayanya, ketika kemudian ada upaya untuk menegakkan kembali politik sebagai panglima. Karena dengan begitu, masyarakat Tionghoa kemudian menjadi korban.

Hal ini terlihat ketika Gubernur Jenderal Belanda selanjutnya, Jenderal Volkeneir, melakukan aksi pembersihan terhadap masyarakat Tionghoa di Batavia (*ethnic cleansing*). Dalam aksi pembersihan sekitar 1740 ribuan orang Tionghoa sengaja dibantai di sebuah kolam yang terletak di belakang Stadhuis (Balai Kota) atas perintah hakim yang merupakan perpanjangan tangan dari Gubernur Jenderal Volkeneir. Bahkan Kapiten Ni Hoe Kong ikut ditangkap, karena diduga terlibat dalam gerakan melawan kompeni.

Namun begitu, adanya *ethnic cleansing* itu tetap saja membuat bisnis di tanah Jawa tidak berubah. Orang Tionghoa tetap menjadi penggerak perekonomian di pulau Jawa, meskipun berganti aktor.

Maka itu, indikasi adanya kongkalingkong Ahok dan para Taipan yang tergabung dalam Naga 9, sudah saatnya dibaca bukan sekadar sebatas sentimen anti Tiongkok. Namun harus diarahkan untuk mematikan sistem yang menumbuhkan kolusi semacam ini.

Agaknya, selama mediator antara kepentingan penguasa dan kepentingan penguasaan pasar diperlukan, maka selama itu pula peranan kelompok pedagang

Tionghoa selalu diperlukan. Sehingga akan selalu muncul So Bing Kong-So Bing Kong baru. Lim Lacco-Lim Lacco baru, Phoa Bingan-Phoa Bingan baru, dan Goa siKwa – Goa siKwa baru.

Sejarah Kelam Para Taipan Menggasak Rawa-Rawa di Jakarta

Sebenarnya kontroversi soal Teluk Jakarta, selain yang saya gambarkan tadi, kalau menelisik sejarahnya, memang selalu ada sangkut-pautnya dengan sepek-terjang para taipan di tanah air.

Bagaimana para taipan rantau di Indonesia ramai-ramai mengejar dan mengincar lahan-lahan tanah di berbagai wilayah kawasan DKI Jakarta. Melalui serangkaian kasus yang mencuat, selalu berujung pada satu tema: Menggasak rawa-rawa, untuk dijadikan pemukiman.

Sekitar satu abad lalu, rawa di Jakarta membentang tak kurang seluas 20.000 hektar, dengan luas kota Jakarta kala itu tak lebih dari 150 km². Sekarang, dengan luas 700 km², rawa di Jakarta ternyata hanya kurang lebih 2000 hektar.

Kenapa bisa berkurang secara drastis seperti itu? Ya itu tadi, rawa-rawa itu telah dicaplok untuk jadi daerah pemukiman.

Booming real estate sejak era 1980-an terjadi di Jakarta, barang tentu mengandung cerita

bagaimana jurus para konglomeat mencaplok rawa-rawa di kawasan DKI Jakarta. Misalnya saja ketika para konglomerat mulai mencaplok rawa di sekitar Sunda Kelapa untuk kompleks wisata yang kini dikenal sebagai Taman Impian Jaya Ancol. Setelah itu, mulailah setapak demi setapak rawa di Jakarta dipreteli satu persatu.

Salah satu aktor penting dari kalangan konglomerat dalam skema pencaplokan rawa-rawa di Jakarta adalah Ir Ciputra, bos Jaya Group. Sasaran utama Pak Ci adalah Rawa di Muara Angke dan Muara Kapuk. Lahan seluas 4000 hektar itu, kemudian ditimbuni 10 juta meter kubik tanah, demi untuk mewujudkan sebuah impian. Membangun sebuah kota di tepian pantai. Mirip seperti kota di ceruk pantai Venesia, Italia.

Langkah Ciputra tidak berhenti sampai di situ saja. Kemudian dia membangun kompleks perumahan mewah di atas lahan seluas 1.200 hektar. Inilah yang kelak dikenal dengan Pantai Indah Kapuk (PIK).

Sebagai bakal calon kota di tepian air, di sekeliling PIK, Marina ditebarkan. Lapangan golf seluas 85 hektar dibangun tak jauh dari kawasan pemukiman itu. PIK juga dilengkapi dengan apartemen, pusat bisnis, mega department store, kompleks perkantoran, kawasan



Ir Ciputra saat perayaan ulang tahunnya ke-84 yang di rayakan di sebuah hotel di Jakarta (26/8).



Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan tanggul di Pantai Muara Baru, Jakarta, Rabu (2/12). Proyek pembangunan tanggul tersebut bertujuan untuk menahan banjir rob yang sering melanda kawasan Muara Baru. Pembangunannya dilakukan di garis bibir pantai sepanjang 32 kilometer.

rekreasi, pusat seni dan perhotelan.

Namun sisi menarik dari kisah ini, Ciputra ternyata tidak sendirian dalam menangani mega proyek ini. Sejumlah konglomerat Indonesia ternyata ikut andil dalam proyek impian Ciputra ini. Seperti Sudwikatmono, Ibrahim Risjad, Henry Priyadi, Mochtar Riadi, Budiarsa Sastrawinata, Andre Halim, Teddy Djohar, dan Djony Djohar, serta Ismail Sofyan.

Melalui penggalangan dukungan dari para konglomerat ini, Ciputra berhasil menggalang dana Rp 3 triliun saat itu.

Tragisnya, warga Jakarta Utara harus menerima akibatnya sebagai korban. Punahnya rawa di Muara Angke misalnya, membuat warga Kelurahan Koja, Tanjungpriok, selalu kebanjiran setiap air laut pasang. Padahal sebelum rawa-rawa itu dicaplok para konglomerat sebagai daerah pemukiman, warga setempat tak pernah mengalami kebanjiran.

Kedaaan serupa juga dialami oleh warga Kelurahan Kebon Bawang. Hujan sedikit saja, daerah ini pasti kebanjiran. Tak heran jika kemudian PIK jadi sasaran kemarahan banyak orang. Sehingga tak kurang dari Profesor Ishemat Surianegara, pakar ekologi dan sumberdaya Institut Pertanian Bogor (IPB), pada 1993 menuding PIK sebagai proyek

mewah yang menyengsarakan rakyat. Punahnya rawa bukan saja menimbulkan banjir, tetapi juga mempermudah pengikisan tepian pantai oleh gempuran ombak.

Masuk akal jika perembesan air laut ke daratan Jakarta juga semakin meluas dan tak terkendali. Rawa Muara Angke sejatinya merupakan kawasan hutan bakau yang berfungsi sebagai penahan abrasi dan intrusi air laut dan hutan bakau di rawa Teluk Naga hancur akibat jadi lahan perumahan.

Menurut catatan Aktual pada Mei 1993, PIK pula yang kemudian mencaplok kawasan hutan lindung di Muara Angke. sekitar 851 hektar dari 1.100 hektar hutan di Muara Angke habis ditelan untuk dijadikan perumahan mewah.

Dalam Tabloid Detik terbitan Mei 1993, Ciputra membantah jika dirinya bertanggungjawab terhadap kerusakan lingkungan akibat proyek-proyek yang dibangunnya di atas rawa-rawa. Menurut Ciputra, PIK didukung oleh konsultan lingkungan dari Belanda, sehingga dampak lingkungan sudah dianalisis dan diperhitungkan secara matang.

Yang mungkin Ciputra lupa, masalah krusial dari proyek ini adalah dampak dari beralihnya rawa-rawa menjadi kawasan pemukiman, bukan pada pasca pembangunan

pemukiman tersebut.

Tapi Ciputra bukanlah aktor satu-satunya dalam urusan mencaplok rawa-rawa di Jakarta. Konglomerasi Dharmala Group pun memainkan jurus serupa. Lewat anak perusahaannya, PT Taman Harapan Indah (THI), konglomerasi milik Hendro Gondokusumo itu menimbun rawa di Muara Karang, seluas 40 hektar, sehingga mirip seperti pulau kecil.

Di atas timbunan rawa ini, dibangun 450 unit rumah, 45 di antaranya dijual seharga Rp 1 miliar. Sisanya, rata-rata dijual Rp 300 juta. Dipicu oleh prospek untung besar, THI kemudian mulai menasar rawa di Muara Karang, untuk lahan 250 unit rumah seharga 700 hingga Rp 1 miliar. Bahkan dalam rencananya, THI akan membangun kondominium dan town house di atas rawa seluas 100 hektar.

Untunglah, dalam jajaran pemerintahan Presiden Suharto kala itu, masih ada menteri yang punya nurani dan akal sehat. IB Sudjana, Menteri Pertambangan dan Energi ketika itu, kemudian membatalkannya, dengan alasan pengurangan rawa di Muara Karang itu akan mempersempit celah pantai, sehingga proses pendinginan air laut yang akan mengalir ke dalam turbin PLTU Muara Karang, terhambat. Dan jika ini dibiarkan terus, mesin turbin akan rusak. Padahal, PLTU Muara Karang merupakan bagian dari interkoneksi aliran listrik Jawa-Bali.

Sayangnya, sekarang ini tidak ada pejabat yang penuh integritas dan berhati-nurani seperti Pak IB Sudjana, untuk menghentikan langkah Gubernur Ahok "Menggadaikan DKI Jakarta" kepada para taipan seperti PT Agung Podomoro PT Muara Wisesa Samudera ataupun yang sejenis dengan itu di masa depan. ◦ Hendrajit

Ahok Bikin Gaduh

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrrachman Ruki menyebut Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sengaja membuat kegaduhan.

Pernyataan Ruki itu disampaikan untuk menanggapi tuduhan Ahok terkait oknum pimpinan KPK yang ingin mengriminalisasi dirinya di kasus pengadaan tanah RS Sumber Waras.

Masalahnya, terkait penyelidikan kasus pembelian tanah RS Sumber Waras itu KPK belum memanggil satu pun pihak. Ruki meminta Ahok untuk tidak mengganggu kinerja para penyelidik dan penyidik KPK.

“Kami tidak mau berpolemik, bikin gaduh saja. Biarlah para penyelidik KPK bekerja, pada saatnya mereka akan gelar perkara dihadapan penyidik dan penuntut umum dengan dipandu oleh pimpinan sesuai SOP kami,” ujar Ruki saat dihubungi, Jumat (11/12).

Dalam kesempatan singkat itu, Ruki kembali menegaskan bahwa tidak ada satu pun pimpinan yang mempunyai kewenangan lebih. Komisioner KPK, sambung dia, bekerja berdasarkan azas kolektif kolegial.

“Mekanisme itu yang kami



Taufiequrrachman Ruki



Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berjalan menuju Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Senin (23/11). Ahok memenuhi panggilan BPK untuk diperiksa terkait pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

pakai, bukan maunya dan apalagi pikirannya orang perorang, siapapun dia dan apapun jabatannya,” ujar dia.

/Wisnu-M. Zhacky Kusumo

Enam Penyimpangan di Kasus RS Sumber Waras



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan hasil audit investigasi terhadap pengadaan tanah RS Sumber Waras (SW) ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (7/12).

Anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi menjelaskan, dari hasil audit tersebut terdapat enam penyimpangan, yang berujung kepada indikasi kerugian keuangan negara.

“(Pengadaan tanah RS SW) terdapat enam penyimpangan. Mulai

dari perencanaan, penganggaran, pembentukan tim pengadaan pembelian lahan RS SW, pembentukan harga dan penyerahan hasil,” kata Eddy saat jumpa pers di gedung KPK.

Namun demikian, ketika disinggung berapa perhitungan kerugian negara dari hasil audit BPK, Eddy enggan menjelaskan. Menurutnya, terkait pengumuman kerugian negara sekarang ini adalah kewenangan KPK.

“Sabar ya, tunggu KPK umumkan jumlah kerugian negara. Itu konsumsinya Pimpinan KPK,” kata dia.

Diketahui, kasus pembelian lahan RS SW bermula setelah BPK menemukan kejanggalan karena Pemprov DKI Jakarta mengalami kelebihan bayar sebesar Rp 191 miliar dari Rp 755 miliar dalam pembelian lahan di Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat untuk pembangunan RS Sumber Waras.

Hal tersebut pertama kali terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap APBD DKI tahun anggaran 2014. Sejumlah pihak telah diperiksa BPK terkait temuan ini. Termasuk Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan mantan Ketua DPRD DKI, Ferrial Sofyan. */Wisnu-M. Zhacky Kusumo*



Kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto, Firman Wijaya menjawab pertanyaan wartawan usai bertemu dengan Setya Novanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/12).

Setnov Laporkan Sudirman Said

Ketua DPR Setya Novanto melaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke Bareskrim Polri melalui kuasa hukumnya Firman Wijaya. Laporan itu dilakukan karena, Sudirman Said telah melakukan beberapa pelanggaran hukum pasca bergulirnya rekaman PT Freeport.

“Ke sini (Bareskrim) untuk

mengadukan Menteri SS (Sudirman Said),” kata Firman di Bareskrim, Jakarta, Rabu (9/12).

Setya Novanto, ujar Firman, mengadukan Sudirman Said dengan beberapa dugaan pelanggaran hukum. “Dugaan tindak pidana fitnah, pencemaran nama baik, penghinaan, dan pelanggaran ITE,”

ujar dia.

Firman mengatakan, upaya pelaporan ini untuk meluruskan tuduhan yang selama ini menyerang kliennya. “Ini sudah menyerang nama baik Setnov. Ini harus ditindak serius. Untuk itu kami ingin meluruskan tuduhan ini, makanya kami lapor ke Bareskrim,” ujarnya.

Menteri ESDM telah mengadukan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena diduga telah mencatut nama Presiden dan Wapres dalam perpanjangan kontrak Freeport.

Bukti rekaman pembicaraan antara Setya Novanto, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha minyak M Riza Chalid yang berisi dugaan pencatutan nama sudah diserahkan ke MKD. Dalam persidangan MKD, Sudirman Said dan Maroef Sjamsoeddin telah diminta keterangannya.

Sementara Ketua DPR Setya Novanto juga telah dimintakan keterangannya oleh MKD.

/Wisu-Fadlan Syiam Butho

Regulasi Listrik Langgar Konstitusi

Penerapan regulasi tarif listrik diberlakukan seperti regulasi harga Pertamina, disebut telah melanggar konstitusi, kata Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi.

“Tarif adjustment oleh PT PLN yang berubah-ubah setiap waktu, itu melanggar konstitusi,” kata Tulus dalam diskusi di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (6/12).

Lebih lanjut, ia menjelaskan sistem adjustment dengan perhitungan sesuai dengan formula inflasi, rata-rata harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) dan kurs dolar mengarahkan bahwa pada saat ini tarif listrik telah dilepas ke pasar.

“Maka itu saya minta aturan itu dihapus,” katanya.

Penjelasannya adalah, jika dilepas ke pasar tentang tarif listrik, berarti

harga akan sesuai dengan mekanisme pasar, sehingga tidak ada peran negara dalam penentuan tarif listrik tersebut.

“Esensi listrik itu ada peran negara, jika tidak maka bertentangan dengan institusi. Harus ada uji meteri,” katanya.

Sebelumnya, tarif listrik pelanggan rumah tangga berdaya 1.300 dan 2.200 VA pada Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar 11,6 persen dibandingkan November 2015 menyusul pemberlakuan mekanisme penyesuaian tarif kedua golongan tersebut.

Kepala Divisi Niaga PT PLN (Persero) Benny Marbun di Jakarta, mengatakan, pada Desember 2015, tarif listrik pelanggan rumah tangga golongan berdaya 1.300 dan 2.200 VA ditetapkan sebesar Rp1.509 per kWh.

Mulai Desember 2015, PLN memberlakukan mekanisme penyesuaian tarif (tariff adjustment) atau tidak mendapat subsidi lagi untuk pelanggan golongan rumah

tangga berdaya 1.300 dan 2.200 VA.

Dengan demikian, per Desember 2015, sebanyak 12 golongan tarif listrik sudah mengikuti mekanisme “tariff adjustment”.

Ke-12 golongan tarif listrik tersebut adalah rumah tangga R-1/tegangan rendah (TR) daya 1.300 VA, rumah tangga R-1/TR daya 2.200 VA, rumah tangga R-2/TR daya 3.500 VA sampai 5.500 VA, dan rumah tangga R-3/TR daya 6.600 VA ke atas.

Selanjutnya, golongan bisnis B-2/TR daya 6.600VA sampai 200 kVA, bisnis B-3/tegangan menengah (TM) daya di atas 200 kVA, industri I-3/TM daya di atas 200 kVA, dan industri I-4/tegangan tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas.

Golongan lainnya adalah kantor pemerintah P-1/TR daya 6.600 VA sampai 200 kVA, kantor pemerintah P-2/TM daya di atas 200 kVA, penerangan jalan umum P-3/TR, dan layanan khusus TR/TM/TT. */Nebby-Ant*

Jangan Gentar dengan Ancaman Arbitrase Freeport

Kegaduhan politik akibat skandal Freeport, masih terus menjadi berita yang terus hangat dalam 2 bulan terakhir ini.

Apalagi skandal tersebut melibatkan Petinggi DPR sampai harus disidangkan di Mahkamah Kehormatan Dewan. Tidak hanya di situ, setelah rekaman percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Syamsudin, dan Pengusaha M Riza Chalid diperdengarkan di MKD dan disaksikan seluruh rakyat Indonesia, polemik tersebut merembet ke pejabat pemerintahan, sampai-sampai Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjiantan berang dan menantang siapa saja yang mempersalahkan (karena namanya dicatut di dalam rekaman) untuk berhadapan dengan dirinya.

Pengamat Energi dan Minerba, Yusri Usman meminta kegaduhan politik tersebut jangan sampai mengalihkan kepada hal yang lebih esensial, yakni PT Freeport Indonesia masih terus melakukan ekspor konsentrat.

Padahal semua mineral yang diambil dari bumi Indonesia, sejak tahun 2014 sudah tidak diperbolehkan dan harus dilakukan proses pemurnian, sesuai UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Apalagi pelanggaran ini didukung oleh Kementerian ESDM yang melakukan kesepakatan MoU dengan Freeport Indonesia.

Yusri menilai tak sepatasnya PT Freeport Indonesia terus-terusan menjadikan perjanjian Kontrak Karya sebagai tameng untuk tidak mengikuti aturan UU Minerba. Pasalnya Freeport sendiripun banyak melanggar aturan dan tidak menjalankan Kontrak Karya tersebut.

Dia mencontohkan seperti kegiatan hilirisasi. Sebenarnya dalam



perjanjian Kontrak Karya juga sudah diatur hal tersebut. Memang di dalam kontrak karya tidak diwajibkan untuk membangun smelter. Akan tetapi, jika ada smelter di dalam negeri, maka Freeport wajib untuk menyuplai bahan baku ke smelter yang ada di dalam negeri.

“Sebenarnya Pasal 10 ayat 4 perjanjian Kontrak Karya juga sudah mengatur bahwa mereka harus melakukan hilirisasi, tapi memang perjanjian tersebut tidak tegas mengaturnya,” kata Yusri sambil menunjukan dokumen Kontrak Karya Freeport kepada Aktual.

Bahkan terkait divestasi kata Yusri, karena dalam kontrak karya Freeport harus melakukan divestasi 51 persen sahamnya kepada Pemerintah Indonesia secara bertahap. Sehingga posisi kita jangan gentar jika suatu saat Freeport mengarbitrasekan pemerintah Indonesia.

“Kita kembali saja ke aturan KK. Karena mereka kan yang selalu yang diadu itu UU Minerba dengan KK ini. Tidak mereka penuhi semua itu KK, contohnya soal divestasi di KK wajib 51%,” tegas Yusri.

Sehingga menurut Yusri tidak masalah jika Freeport belum mau mengikuti aturan UU Minerba. Karena Pasal 169 juga dijelaskan boleh tidak mengikuti aturan UU sampai KK berakhir.

“Tapi di poin b disebutkan, kalau ada poin-poin lain maka harus mengikuti. Tapi mereka gak mau ya silakan,” ucap dia.

Terkait Izin kegiatan ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia akan berakhir pada 24 Januari 2016 sesuai MoU antara Kementerian ESDM dengan Freeport. Karena MoU tersebut jelas melanggar UU No.4/2009, publik harus terus memantau dan mengawasi jangan sampai ada lagi MoU yang melanggar UU Mineral dan Batubara (Minerba).

“Jika ada PP (Peraturan Pemerintah), Permen (Peraturan Menteri), atau peraturan di bawahnya seperti MoU yang bertentangan dengan peraturan di atasnya seperti UU Minerba dan UUD Pasal 33 ayat 2 dan 3, maka harus kita gugat ke Mahkamah Agung (MA),” tegas Yusri.

Yusri menegaskan semua peraturan harus bermuara ke UUD 1945. “Tidak boleh tidak, kalau UU



Sejumlah haul truck beroperasi di area Grasberg open pit PT Freeport Indonesia, Tembagapura, Papua, Senin (18/8)

bertentangan dengan UUD kita gugat ke MK, tapi kalau ada PP yang bertentangan dengan UU maka kita harus perjuangkan lewat MA.”

Terkait Kementerian ESDM yang berencana untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemerintah mengklaim perevisian PP tersebut merupakan salah satu upaya untuk menjamin investasi di sektor pertambangan.

Dalam hal investasi tersebut, PT Freeport Indonesia sudah mengirimkan proposal berisi klausul pembaharuan kontrak yang akan habis pada 2021 mendatang.

Menanggapi perevisian PP 77, Yusri kembali menegaskan, perevisian PP 77 jangan sampai digadaikan hanya untuk melanggengkan pembaharuan kontrak Freeport. Peraturan itu nantinya, harus sejalan dengan semangat UU Minerba.

“Bahwa revisi PP Nomor 77 Tahun 2014 kalau dianggap bertentangan dengan UU Minerba, bisa digugat ke Mahkamah Agung (MA). Karena menyangkut kepentingan, dianggap sudah merugikan rakyat banyak,” papar Yusri.

Menteri ESDM Sudirman Said belakangan ini memang menjadikan PP tersebut sebagai tameng, hal itu terlihat saat dia memberikan rekomendasi izin ekspor konsentrat Freeport pada Juli 2015 lalu.

Hal itu pun ditanggapi juga oleh Yusri. Dengan merujuk pernyataannya tadi, dia jelas menegaskan bahwa nantinya Menteri

Sudirman tidak akan bisa lagi menjadikan PP itu sebagai tameng.

“Kalau PP-nya dikabulkan gugatannya oleh MA. Maka secara otomatis Peraturan Menteri (Permen) setingkat di bawahnya akan gugur juga,” pungkasnya.

Dalam Paket Kebijakan Ekonomi jilid I yang dikeluarkan September 2015, pemerintah melalui Kementerian ESDM memasukkan PP Nomor 77 Tahun. 2014 ke dalam 154 aturan yang rencananya akan dideregulasi.

Poin utama yang akan diubah adalah masa pengajuan perpanjangan izin operasi dari dua tahun menjadi lima tahun sebelum kontrak pertambangan berakhir untuk kontrak mineral non logam. Sedangkan masa pengajuan izin perpanjangan operasi untuk kontrak pertambangan mineral logam diusulkan dapat dilakukan 10 tahun sebelum kontrak berakhir. ◦

Arbie Marwan



Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy, dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Pemuda Muslimin Indonesia (PB PMI) dengan tema "Keniscayaan Nasionalisasi Dibalik Sengkaret Freeport" di Jakarta, Minggu (13/12/2015).

UU Minerba dan Freeport

Polemik izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia awalnya berasal dari penyalahgunaan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang menyebutkan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara tegas Pasal 33 UUD 1945 melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan Perorangan atau Pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dianggap bertentangan dengan prinsip Pasal 33 UUD 1945.

Keberadaan PT Freeport Indonesia berdasarkan Kontrak

Karya pada tahun 1967 berdasarkan UU 11/1967 mengenai Penanaman Modal Asing (PMA). Renegoisasi pun berlanjut, Pemerintah dan DPR mengatur pertambangan mineral dan batubara dalam Undang-undang nomor 4 tahun 2009. Pada Bab III terkait penguasaan mineral dan batubara, pasal 4 dan 5 ayat 1 disebutkan bahwa untuk kepentingan nasional, Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri. Ayat (2) Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengendalian produksi dan ekspor. Ayat (3) Dalam melaksanakan

pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun setiap provinsi.

Penguasaan negara dalam makna Staatsbeheer, bukan dalam makna pemilikan negara. Makna penguasaan yang dimaksud adalah negara sebagai organisasi yang diberi mandat atas nama rakyat untuk melakukan pengelolaan dan pengusahaan.

Oleh karenanya, permintaan pemerintah untuk membangun smelter, disamping meningkatkan nilai jual, juga sebagai wujud penguasaan negara terhadap proses produksi, jumlah dan hasil alam yang dihasilkan dari alam Indonesia.

Salah satu kelemahan dari UU Minerba tersebut adalah terkait batasan luasan wilayah untuk eksplorasi yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1) dan pasal 61 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009. Pasal 52 ayat (1) : Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare. Pasal 55 ayat (1): Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

Selain itu, Pasal 112 ayat (1) : Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional. Pasal inilah yang terus dilanggar oleh Freeport yang enggan melakukan divestasi kepada pemerintah Indonesia.

Pakar Ekonomi Ichsanuddin

Noorsy mengatakan jika Undang-Undang Minerba selama ini lebih banyak membela kepentingan pihak Asing. Pemerintah Indonesia gagal menjaga kedaulatan energi demi kepentingan rakyatnya. Padahal, Indonesia merupakan negara yang memiliki cadangan minyak, gas dan minerba yang cukup besar.

"Hanya negara bodoh yang menyerahkan kedaulatan energinya kepada negara asing. Meski cadangan migas dan minerba melimpah, namun kita tidak bisa berbuat banyak," katanya.

IMA mengusulkan agar dalam amandemen UU Minerba nomor 4 tahun 2009 dapat mengatur bentuk perusahaan pertambangan dengan menggunakan sistem Konsesi. Konsesi merupakan sistem perusahaan SDA yang didahului dengan izin (keputusan publik) dari Pemerintah kemudian disertai dengan kontrak.

"Kontrak di sini bukanlah kontrak perdata namun kontrak publik yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar tim pengkaji IMA, Tri Hayati.

Untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha kepada pelaku usaha, maka terhadap kontrak tersebut diberikan jaminan tidak akan berubah dalam jangka waktu 15 tahun. Namun setelah itu wajib dilakukan peninjauan ulang setiap 15 tahun sekali dengan mengacu pada perubahan dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Perlu merubah IUP menjadi sistem konsesi yang didahului dengan ijin (keputusan publik) dari Pemerintah dan disertai dengan kontrak publik kepada kontraktor pertambangan," jelasnya.

Ketua IMA Martiono Hadianto mengatakan, UU Minerba hanya menyatakan pengendalian ekspor yang artinya mengutamakan kepentingan dalam negeri (domestic market obligation/DMO).

"Larangan ekspor di UU tidak ada, yang ada adalah ketentuan mengenai pembatasan ekspor," kata

Martiono di Jakarta.

Pemerintah harus mempertimbangkan kebutuhan dalam negeri dalam menerapkan pembatasan ekspor tersebut. Pemerintah harus mengidentifikasi lebih dahulu industri di dalam negeri yang membutuhkan pasokan produk hasil fasilitas pemurnian (smelter). Setelah itu hasil tersebut disampaikan ke DPR untuk mendapat penetapan batasan ekspor.

"Pelarangan ekspor yang dilakukan pemerintah saat ini berdasarkan kandungan mineral," ujarnya.

Jenis-jenis mineral yang dibolehkan ekspor diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2015. Dalam beleid itu memuat mineral hasil pengolahan dan pemurnian yang diizinkan ekspor. Sedangkan dalam Permen ESDM No. 1 Tahun 2014 menyatakan ekspor mineral hasil olahan hanya diizinkan hingga 2017. Artinya pasca 2017 hanya mineral hasil pemurnian yang diizinkan ekspor.

Kemudian, hilangnya penggolongan bahan galian telah menyebabkan terjadinya eksploitasi sumber daya alam (SDA) tambang tanpa kendali sehingga terjadi kerusakan lingkungan dan penerimaan negara tidak optimal, yang akhirnya berujung pada ketidaksinambungan ketersediaan SDA dalam mendukung pembangunan nasional bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Oleh sebab itu, perlu dilakukan suatu perubahan dan perbaikan dalam UU Minerba dengan kembali mengadopsi penggolongan bahan galian vital, strategis dan non vital strategis," ujar Tri Hayati.

Bahan galian vital yaitu bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Bahan galian strategis yaitu bahan galian yang strategis bagi pertahanan atau keamanan negara atau bagi perekonomian Negara. Sedangkan non vital strategis yaitu bahan galian yang tidak termasuk dalam vital dan strategis.

"Golongan vital dan strategis merupakan kewenangan Pemerintah

pusat namun dapat dilimpahkan kepada Daerah atas izin Menteri ESDM. Sementara non vital strategis merupakan kewenangan otonomi pemda berdasarkan asal desentralisasi sebab bersifat lokal kedaerahan," pungkasnya.

Terkait dengan pelanggaran izin ekspor konsentrat PTFI yang berujung pada perpanjangan kontrak Freeport, Pada 9 Oktober 2015, Kementerian ESDM mengeluarkan siaran pers yang menyatakan Freeport-McMoRan Inc-PT Freeport Indonesia (PTFI) dan Pemerintah Indonesia telah menyepakati operasi jangka panjang dan rencana investasi PT-FI.

Besarnya investasi PT-FI dan komitmen yang telah dan sedang berlangsung telah memberikan manfaat bagi Indonesia, menjadi sebuah pertimbangan kesepakatan ini, termasuk meningkatnya nilai royalti, pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, divestasi dan konten lokal. Pemerintah telah meyakinkan PT-FI bahwa Pemerintah akan menyetujui perpanjangan operasi pasca 2021 termasuk kepastian hukum dan fiskal yang terdapat pada Kontrak Karya.

"Kami sangat senang dengan jaminan kepastian hukum dan fiskal dari Pemerintah Indonesia. Kami berharap melanjutkan kemitraan dan rencana investasi jangka panjang kami untuk memajukan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan perekonomian di Papua," ujar Chairman of the Board Freeport-McMoRan Inc, James R. Moffett.

Namun pada 12 Desember 2015, Kementerian ESDM berkilah bahwa yang dimaksud dengan kesepakatan kelanjutan operasi antara PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah RI adalah kesepakatan untuk menjaga kelangsungan operasi tambang, termasuk menyiapkan langkah-langkah investasi karena PT Freeport Indonesia masih memiliki Kontrak Karya yang berlaku sampai dengan 2021.

"Menyepakati kelanjutan operasi kompleks pertambangan Grasberg pasca 2021 tidak sama dengan perpanjangan kontrak karya," ujar humas ESDM, Hufron. ◉ Ismed Eka Kusuma



Salah seorang nelayan menunjukkan Kartu Nelayan yang baru saja diterimanya di Desa Ogotua, Dampal Utara, Tolitoli, Rabu (2/12).

Penangkapan Ikan Ilegal Rugikan Negara USD30 Miliar/Tahun

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan Indonesia mengalami kerugian hingga USD30 miliar per tahun disebabkan pencurian ikan atau dikenal dengan *illegal unreported*

and unregulated fishing (IUU Fishing).

“Kegiatan IUU Fishing menyebabkan hilangnya pendapatan negara dalam jumlah yang signifikan” terang rilis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jum’at (11/12).

Adapun upaya yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan

Susi Pudjiastuti, untuk mencegah dan memberantas IUU Fishing di Indonesia dengan menenggelamkan kapal, dan penegakan hukum administrasi dan pidana.

Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan perbaikan sistem tata kelola usaha penangkapan ikan yang meliputi pendaftaran kapal, penguatan fungsi kontrol pelabuhan dan perbaikan sistem perizinan perikanan.

Upaya penanggulangan lainnya yakni perbaikan sistem pelaporan hasil tangkap ikan, perbaikan sistem pengawasan dan pemantauan kepatuhan operasi, penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia serta penguatan koordinasi nasional dan internasional.

Kebijakan taktis yang diterapkan oleh KKP antara lain melarang alih muatan dan penggunaan alat tangkap yang tidak adaptif untuk keberlanjutan. /Arbie Marwan-Dadang Sah



Ketahanan Energi, Pemerintah RI akan Bentuk Dana Energi 2016

itu untuk membangun ketahanan energi,” ujar Menteri ESDM, Sudirman Said, dalam konferensi pers, di Banda Aceh, Sabtu (12/12).

Dana tersebut, menurut ia, nantinya dapat digunakan untuk eksplorasi, membangun energi terbarukan, riset, pendidikan SDM dan lain-lainnya.

Sumber dananya, lanjut dia, selain berasal dari penggabungan dana-dana yang sudah ada, juga akan dikumpulkan dari pajak BBM dan dari APBN.

“Dari Kemenkeu mengeluarkan opsi memungut pajak atau cukai dikhususkan dana atau bekal dana energi. Mengerucut dari masing-masing, dikonsolidasi menjadi satu,” tutur dia.

Perluanya percepatan

pembentukan dana energi, kata dia, juga untuk mengejar ketertinggalan pembangunan energi terbarukan.

Ia menuturkan, pemerintah bersungguh-sungguh menepatkan energi baru-terbarukan sebagai kekuatan sumber energi nasional dan menargetkan penggunaan sebesar 23 persen pada 2025.

Menurut dia, Kementerian PPN/Bappenas juga telah memasukkan dana energi ke dalam perencanaan.

Ia mengemukakan, seluruh wakil pemerintah dan kepentingan juga mempercepat pembangunan energi terbarukan dan serius dalam mengurus permintaan energi.

“Kami tidak fokus membangun saja, selain rencana dana ketahanan energi, kami mendorong percepatan transportasi untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mendorong energi bersih misalnya memanfaatkan sampah jadi energi,” kata dia. /Ferro Maulana-Ant

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana membentuk dana energi untuk membangun ketahanan energi nasional pada 2016.

“Seperti Dana Sawit, ini satu ide mengkonsolidasi semua dana menjadi satu dan kita menggunakan dana

Rupiah Sentuh Level Rp14.000 Lagi



Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyentuh level Rp14.000 pada Kamis (10/12). Kurs jual dolar AS Bank Mandiri pada pukul 09.24 WIB di posisi Rp13.975, sedangkan beli di level Rp13.930.

“Potensi pelemahan rupiah masih ada menjelang FOMC meeting minggu depan. Perhatian juga akan tertuju pada data neraca perdagangan November 2015 dan BI Rate,” kata Ekonom Samuel Sekuritas Indonesia Ranga Cipta di Jakarta, Kamis (10/12).

Seperti dikutip dari data perdagangan Reuters, dolar AS pagi itu dibuka di Rp 14.006 dibandingkan posisi pada perdagangan sore dua hari lalu Rp 13.991.

Dolar AS tak bertahan lama di kisaran Rp 14.000-an dan secara perlahan mulai melemah hingga ke titik terendahnya hari ini di Rp 13.930. Menjelang siang hari ini The Greenback berada di posisi Rp 13.950.

Bank BCA pada situs *onlinenya* mematok kurs jual dolar ke rupiah di Rp13.980, sedangkan kurs beli di Rp13.880.

Analisis Senior HD Capital, Yuganur Wijanarko menilai dolar AS melemah terhadap mata uang utama lainnya lantaran investor memangkas posisi jangka panjang pada dolar terhadap Yen dan Euro menjelang pertemuan kebijakan The Fed. Indeks dolar, yang mengukur *greenback* terhadap enam mata uang utama, turun 1,10 persen menjadi 97,393 pada akhir perdagangan. /Ismed Eka Kusuma

Ini Pijakan Freeport Enggan Bangun Smelter



Undang-Undang Minerba Nomor 4 tahun 2009 mengamankan agar perusahaan pertambangan di dalam negeri tidak lagi mengekspor bahan mentahnya dan diwajibkan untuk membangun smelter (pabrik pemurnian) di dalam negeri agar hasil tambang yang akan diekspor bisa terlebih dulu dimurnikan. Ketika banyak perusahaan tambang lain terpaksa menghentikan kegiatan ekspor sembari mempersiapkan smelternya, namun pada kenyataannya, perusahaan tambang besar sekaliber PT Freeport Indonesia (PTFI) justru mendapatkan perlakuan berbeda.

PTFI hingga saat ini masih bisa melakukan ekspor bahan mentahnya tanpa melalui proses pemurnian. Perlakuan istimewa ini dilakukan dengan berlandaskan pada nota kesepahaman (MoU) relaksasi antara PTFI dengan Kementerian ESDM yang jelas-jelas berlawanan dengan amanat UU Minerba.

Mengapa hal tersebut dibenarkan Pemerintah? Benarkah posisi MoU lebih tinggi dari UU?

Ahli Hukum Augustinus Hutajulu menerangkan, yang pertama harus diperhatikan dengan cermat adalah mengenai keberadaan MoU yang merupakan kelanjutan dari perjanjian Kontrak Karya (KK) antara Indonesia dengan Freeport pada 30 Desember 1991. Perjanjian KK ini memiliki kekuatan yang setara dengan UU (Pacta Sunt Servanda, bandingkan pasal 1338 KUHPerdata).

Menurut pasal 169 UU Minerba No. 4 Tahun 2009 bagian ketentuan peralihan, ‘pada saat UU ini mulai berlaku, kontrak karya dan perjanjian

pengusahaan pertambangan batubara masih tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian’.

“Jadi nanti kalau KK itu sudah berakhir pada 2021, maka tidak ada lagi perpanjangan kontrak. Tetapi kalau permintaan perpanjangan Freeport dikabulkan, maka tidak berupa KK lagi, melainkan berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau paling jauh berupa IUP khusus yang sesuai dengan UU Minerba No 4/2009 itu,” kata Augustinus saat berbincang dengan Aktual di Jakarta, Selasa (8/12).

Terkait kewajiban membangun Smelter, ia menjelaskan bahwa sejatinya kewajiban tersebut diberlakukan pada perusahaan-perusahaan yang IUP-nya berdasarkan UU Minerba No. 4/2009.

“Saya tidak melihat dalam Kontrak Karya Freeport tentang adanya kewajiban pembangunan smelter. Jadi pemerintahan Jokowi mengkehendaki dibangunnya smelter itu adalah sebagai bukti adanya itikad baik dari Freeport yang akan menjadi bagian dari pertimbangan apakah pada setelah kontrak berakhir tahun 2021 Freeport akan diberi IUP/IUP Khusus atau tidak,” jelas dia.

Dalam pasal 1338 KUH Perdata memang disyaratkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

“Coba bayangkan jika Freeport tidak bisa mengekspor hasil yang ditambanginya sementara KK masih berlaku, maka disamping telah melanggar isi KK itu sendiri, juga akan melanggar prinsip dalam hukum kontrak Internasional, serta akan menimbulkan dampak negatif yang luar biasa. PHK, Pendapatan Negara dan lainnya,” imbuh dia.

Dengan begitu, jelas bahwa carut marut yang terjadi saat ini adalah dampak negatif dari adanya KK, sehingga menyulitkan bangsa Indonesia dalam meningkatkan nilai tambah terhadap dunia pertambangan dalam negeri.

“Juga pelaksanaan kontrak divestasi sebesar 51 persen yang dilanggar Freeport, serta pengelolaan limbah dari proses tambang yang merusak lingkungan,” tutupnya. /Ismed Eka Kusuma-Dhanu Akbar



“Berkah” dari Sikap Anti-Islam Donald Trump

Kampanye Donald Trump yang anti-Muslim awalnya dikhawatirkan akan memperburuk posisi Muslim Amerika pasca aksi teror Paris. Namun, reaksi balik terhadap Trump justru menguntungkan kaum Muslim, yang citranya sempat dirusak oleh ISIS.

Aksi teror kelompok radikal-ekstrem ISIS (Islamic State of Iraq dan Syria) di Paris, Perancis, dan beberapa negara lain di Timur Tengah dan Afrika, bulan November 2015, betul-betul meraih “sukses besar” dalam merusak nama Islam dan memojokkan kaum Muslim. Seperti sudah diduga, mayoritas dari 1,6 miliar kaum Muslim dunia --yang tidak ada hubungannya dengan teror-- justru tercoreng namanya, dan jadi sasaran kebencian di sejumlah negara gara-gara ulah ISIS.

Salah satu negara itu adalah Amerika Serikat. Kebetulan, tak lama setelah aksi teror Paris juga terjadi serangan dengan senjata api di San Bernardino, California, yang dilakukan oleh pasangan Muslim. Momen ini dengan cepat dilahap oleh sejumlah kandidat, yang ingin maju dalam pemilihan presiden (pilpres) AS mendatang. Salah satunya adalah pengusaha Donald Trump.

Sejumlah retorika kasar, personal, diskriminatif, rasis, dan tidak konstitusional dilancarkan oleh Donald Trump, demi memenuhi ambisinya menjadi Presiden AS lewat jalur nominasi Partai Republik. Ia membikin heboh dengan kampanye murahan, namun cukup sukses dalam mengangkat popularitasnya. Trump mengusulkan pelarangan Muslim masuk ke AS dengan dalih menangkal terorisme.

Ucapan itu berdampak secara internasional. Pemerintah AS pun

jadi sibuk membantah ucapan Trump, dengan mengatakan bahwa ucapan Trump itu tidak mewakili nilai-nilai Amerika. Komentar Trump, menurut Gedung Putih, bisa membuatnya didiskualifikasi dari ajang pilpres AS.

Mengaku Meniru Roosevelt

Trump membela idenya untuk melarang semua Muslim memasuki AS. Menurutnyanya, idenya itu tak beda dengan kebijakan Presiden Franklin D. Roosevelt yang mengawasi ketat orang-orang asal Jepang di interniran, usai serangan terhadap Pearl Harbor pada masa Perang Dunia II. “Kami tidak punya pilihan selain melakukan hal ini,” lanjutnya.

Apapun dalih Trump, api kemarahan sudah terlanjur menjalar. Saingannya kandidat dari kubu Partai Demokrat, Hillary Clinton, menentang keras usulan Trump. Mantan ibu negara itu pada 12 Desember 2015

menyebut, apa yang dilontarkan konglomerat real-estate itu bukan hanya memalukan dan keliru, tapi juga "berbahaya". Kata Hillary Clinton, "Dengan pernyataannya, Trump justru memberikan 'alat propaganda' bagi ISIS, untuk merekrut lebih banyak pengikut dari Eropa dan AS."

Tokoh-tokoh Muslim Amerika, termasuk legenda tinju Muhammad Ali, mengecam ucapan Trump. Di dunia internasional, Perdana Menteri Inggris, David Cameron, menyatakan komentar Trump sebagai sikap memecah belah. "Ucapan Trump itu) tidak membantu dan cukup salah," katanya. Presiden Iran, Hassan Rouhani, juga mengecam komentar Trump dan menilai AS telah menciptakan terorisme.

Di Edinburgh, pemerintah Skotlandia mencoret nama Trump dari daftar duta bisnis mereka. Menteri Utama Skotlandia Nicola Sturgeon pada 11 Desember 2015 secara resmi mencabut gelar Donald Trump sebagai duta bisnis untuk Skotlandia. Sebelum aksi Sturgeon, sekitar 200 ribu orang di Britania Raya telah menandatangani petisi, yang menuntut agar Pemerintah Inggris melarang Trump berkunjung ke negaranya.

Berdampak ke Bisnis Trump

Ucapan Trump bukan cuma berdampak politis, tetapi juga merugikan bisnis Trump sendiri di negara-negara Timur Tengah, yang mayoritas populasinya adalah warga Muslim Arab. Nama dan foto Trump yang terpasang di sejumlah papan reklame di Dubai, Uni Emirat Arab, telah diturunkan pada 11 Desember 2015. Pada papan reklame dekat lokasi proyek pembangunan "Akoya" itu sebelumnya menampilkan foto Trump dan putrinya Ivanka, serta tulisan "Trump International Golf Club."

Di daerah itu memang menjadi lokasi proyek pembangunan dua lapangan golf dan sebuah perumahan, bernilai miliaran dollar AS. Proyek yang menjadi tanggung jawab Damac Properties itu menjalin kerja sama dengan Trump, dengan menggunakan brand sang kandidat capres AS untuk

proyek pengembangan tersebut.

Rantai pasar swalayan Lifestyle telah menghentikan penjualan berbagai produk lampu, cermin, dan kotak-kotak perhiasan Trump Home. "Berkaitan dengan pernyataan-pernyataan terakhir yang diucapkan oleh kandidat presiden (Donald Trump) di media AS, kami telah menghentikan penjualan semua produk dari jajaran produk rumah tangga Trump Home," ujar CEO Landmark, induk rantai Lifestyle, Sachin Mundhwa. Ini adalah salah satu grup retail terbesar di Timur Tengah, dengan 190 pasar swalayan di kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Pakistan.

Miliuner Saudi, Pangeran Alwaleed bin Talal, menyerukan pada Trump agar mundur saja dari pencalonan pilpres. "Anda bukan hanya memalukan buat GOP (Partai Republik), tetapi seluruh Amerika. Mundurlah dari pemilihan presiden AS karena Anda tak akan pernah menang," tulis Alwaleed di akun Twitter-nya. Akun Alwaleed memiliki lebih dari empat juta pengikut, atau hampir sama populernya dengan akun Twitter Trump.

Tapi Trump langsung membalas kritik itu lewat akun Twitter-nya. "Pangeran bebal @Alwaleed_Talal ingin mengontrol para politisi AS dengan uang ayahnya. Dia tak bisa melakukannya jika saya terpilih (jadi presiden)," tulis Trump.

Reaksi dari Kalangan Yahudi

Reaksi negatif terhadap Trump, secara tak terduga bukan hanya berasal dari kalangan Muslim, tetapi juga dari kalangan Yahudi. Tanpa diduga oleh Trump sendiri, kalangan Yahudi dan Muslim Amerika –yang biasanya berselisih paham soal isu Israel-Palestina—kini bersatu pendapat dalam mengecam Trump.

Ini berawal dalam sebuah wawancara. Waktu itu Trump ditanya, apakah dia berpikir bahwa pemerintah AS harus mengeluarkan kartu identitas atau lencana identitas khusus untuk Muslim Amerika, sebagai cara untuk melacak dan memisahkan mereka. Itu tampaknya hanya sebuah pertanyaan pancingan. Namun Trump dengan

cepat menelan umpan itu. Trump bahkan setuju untuk melacak tindakan kaum Muslim di database. Tindakan ini jelas-jelas melanggar terlalu banyak aspek dalam konstitusi AS.

Jawaban "ya" dari Trump membuat kalangan Yahudi menganggap, pendekatan Trump terhadap Muslim Amerika sangat mirip dengan pendekatan tokoh Nazi Jerman Adolf Hitler terhadap kaum Yahudi, semasa Perang Dunia II. Hitler memaksa warga Yahudi mengenakan tanda bintang emas untuk menstigmatisasi mereka, dan akhirnya menciptakan jalur untuk berbuat yang jauh lebih buruk terhadap kaum Yahudi. Dari sinilah, kelompok-kelompok Yahudi mulai satu suara dengan kaum Muslim, dan mereka sama-sama mengecam Trump.

Bahkan suara menentang Trump juga muncul dari kalangan Yahudi di Israel. Trump awalnya merencanakan untuk berkunjung ke Israel, namun melihat gelombang penentangan itu ia menunda kunjungannya ke Israel pada 10 Agustus 2015. Ia mengatakan, kunjungan itu akan dilakukan kapan-kapan ketika ia sudah menjadi Presiden AS.

Menghadapi tekanan reaksi negatif, Trump berusaha mengalihkan kesalahan ke pihak media. Lewat akun Twitter-nya, Trump mengklaim, semua kehebohan itu hanyalah hasil rekayasa media. Tetapi rekaman wawancara dengan Yahoo News jelas menunjukkan bahwa Trump mendukung penuh langkah diskriminatif berupa pemberian tanda identitas khusus untuk Muslim.

Api kemarahan dan reaksi internasional ini tidak mudah dilupakan. Posisi Trump sebagai pengusaha dan selebritas dunia membuat sikapnya yang diskriminatif terhadap Muslim ini jadi catatan dunia, tepat di saat prasangka dan kebencian terhadap Muslim baru saja dimunculkan oleh ulah ISIS. Jadi, kehadiran Trump tanpa disadari telah menjadi "berkah" tersembunyi, untuk menandingi dan meredakan citra negatif terhadap Muslim. Mungkin "tangan Tuhan" telah ikut bermain di sini. ◦

Satrio Arismunandar



Inilah Rahasia Tersembunyi Kabah di Mekah

Berkesempatan ke kota suci Mekah dan melakukan ibadah Haji atau Umrah, adalah impian bagi setiap umat Islam. Di kota suci tersebut kita akan melihat Kabah (yang disebut sebagai rumah Allah SWT) sekaligus kiblat umat Muslim dalam menunaikan salat lima waktu.

Namun, apakah arti Kabah sebenarnya? Kata Kabah sebenarnya diambil dari kata Ka'bu yang artinya mata kaki atau tempat kaki berputar bergerak untuk melangkah. Atau Ka'bain yang berarti dua mata kaki, mata Bumi, sumbu Bumi atau kutub putaran utara Bumi. Itulah yang menjadi ritual Ibadah Haji yang dilakukan umat Muslim setiap tahunnya.

Misteri Kabah, sama seperti rahasia Allah SWT, dimana kuasa Allah SWT-lah yang paling Maha Kuasa untuk Alam Semesta ini. Banyak peneliti yang mengatakan bahwa Kabah menjadi titik atau pusat dari Bumi.

Salah satu di antaranya yaitu, Profesor Hussain Kamel, Kepala Bagian Ilmu Ukur Bumi di Universitas Riyadh, Arab Saudi. Ia mengatakan demikian, ketika ia mengamati dengan seksama (cermat) posisi ke tujuh Benua terhadap Mekah dan jarak masing-masingnya.

Ia memulai untuk menggambar garis-garis sejajar hanya untuk memudahkan proyeksi garis bujur dan garis lintang.

Dari sanalah Prof.Kamel menarik kesimpulan bahwa sebenarnya Mekah yakni, pusat dari Bumi. Terkait dengan hal tersebut, dari beberapa Hadis dan ayat suci Al Quran yang menyebutkan bahwa Mekah merupakan pusat Bumi, seperti tercantum dalam surat As-Syura (7).

“Mekah disebut dalam Al Quran dengan istilah “Ummul Quro” (ibu atau induk dari kota-kota). Lantas, mengapa juga Allah SWT menyebut daerah lain selain Mekah dengan kalimat “ma haulahaa” (negeri-negeri sekelilingnya)?

Allah SWT berfirman dalam Al Quran, “Demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al Quran dalam bahasa Arab supaya kamu



memberi peringatan kepada Ummul Qura (penduduk Mekkah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya.”

Kemudian, ada sebuah Hadis yang menyebutkan bahwa Masjidil Haram di Mekah, tempat Kabah berada itu ada di tengah-tengah tujuh lapisan langit dan tujuh Bumi. Adapun beberapa informasi terkait Kabah yang belum kita ketahui sebelum ini, di antaranya:

Pertama, Mekah adalah wilayah yang memiliki gravitasi paling stabil

Kedua, tekanan gravitasi yang tinggi, menyebabkan pusat kebisingan yang tak bisa terdengar oleh telinga.

Ketiga, berkaitan dengan tekanan gravitasi yang tinggi membuat tubuh kebal terhadap serangan penyakit.

Keempat, doa termakbul. Gravitasi tinggi = elektron ion negatif yang berkumpul di situ tinggi = doa akan termakbul karena di situ adalah tempat gema atau ruang dalam waktu bersamaan.

Kelima, apa yang diniatkan di hati adalah gema yang tidak bisa didengar tapi bisa terdeteksi frekuensinya. Pengaruh elektron menyebabkan kekuatan internal kembali tinggi, penuh semangat untuk melakukan ibadah, tidak ada sifat putus asa, mau terus hidup, penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT.

Keenam, posisi Kabah tidak terdeteksi oleh gelombang radio.

Ketujuh, teknologi satelit pun tidak bisa meneropong apa yang ada di dalam Kabah

Kedelapan, Masjidil Haram berada di tempat tinggi, sebab itulah salat di sana terasa dingin.

Kesebelasan, Kabah bukan sekadar bangunan hitam empat persegi tetapi satu tempat yang ajaib karena disitu pemusatan energi, gravitasi, zona magnetisme nol dan tempat yang paling dirahmati Allah SWT.

Kesepuluh, tidur dengan posisi menghadap Kabah secara otomatis otak tengah akan terangsang sangat aktif sampai tulang belakang dan menghasilkan sel darah.

Kesebelas, pergerakan mengelilingi Kabah arah lawan jam memberikan energi hidup alami dari alam semesta. Semua yang ada di alam ini bergerak menurut lawan jam, Allah SWT telah tentukan hukumnya seperti itu.

Keduabelas, mengelilingi Kabah ke arah lawan jarum jam dapat memperlancar sirkulasi darah.

Ketigabelas, sedangkan bilangan tujuh itu adalah simbolik ketidak terhingga banyaknya. Angka tujuh itu berarti tidak terbatas atau terlalu banyak. Dengan melakukan tujuh kali putaran sebenarnya kita mendapat ibadah yang tidak terbatas jumlahnya.

Keempatbelas, larangan memakai topi, songkok atau menutup kepala karena rambut dan bulu roma (pria) adalah ibarat antena untuk menerima gelombang yang baik yang dipancarkan langsung dari Kabah. Sebab itulah melakukan Haji kita seperti dilahirkan kembali sebagai manusia baru karena segala yang buruk telah ditarik dan diganti dengan nur atau cahaya yang baru.

Kelimabelas, setelah selesai semua itu barulah bercukur atau tahalul. Tujuannya untuk melepaskan diri dari pantang larang dalam Ihram. Namun rahasia di sebaliknya yaitu untuk membersihkan antena atau reseptor kita dari segala kotoran sehingga hanya gelombang yang baik saja akan diterima oleh tubuh manusia. ◦

/Fero Maulana-Leonina Kusumaningtyas L

'Pesantren Festival 2015' Lahirkan Karya Fenomenal Santri



Even 'Pesantren Festival' tahun ini mengusung berbagai kegiatan, seperti 'stand-up comedy', lomba cipta karya hymne dan mars santri, lomba cipta lagu pop religi, lomba cipta film santri, dan lomba cipta logo Hari Santri.

Program yang diusung oleh Kementerian Agama tersebut menunjukkan bahwa santri tak hanya mempelajari ilmu agama, fiqh, dan bahasa Arab, namun juga mampu bersaing dalam dunia sains dan teknologi serta siap berkompetisi dengan lembaga pendidikan lainnya.

"Kalangan Pondok Pesantren harus terus mendorong peningkatan kualitas ibadah umat, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang baik dan berakhlak mulia," demikian kata Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Prof Kamaruddin Amin, kepada Majalah Aktual, di Pondok

Pesantren Darunnajah Ulujami Jakarta, baru-baru ini.

Prof Kamaruddin berharap, di masa mendatang santri Indonesia bisa melahirkan karya spektakuler seperti halnya komponis Mozart, Beethoven, Bach, Chopin ataupun Scriabin. Karya musik klasik seperti itu ternyata dinikmati warga dunia sepanjang zaman bahkan menjadi penanda tingginya budaya sebuah masyarakat tersebut.

Ia kembali menuturkan, Pesantren tidak cukup menyediakan lembaga pendidikan, namun juga harus melahirkan karya monumental yang memiliki daya 'magic' yang lebih kuat untuk mengarahkan masyarakat Tanah Air kepada kemanfaatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Sementara itu, menariknya, selain program Kemenag, 'Pesantren Festival 2015' juga menampilkan berbagai produk dari delapan kategori Pesantren.

Yaitu pesantren teknologi, pesantren perdagangan, pesantren peternakan, pesantren perkebunan, pesantren koperasi, pesantren kewirausahaan, pesantren maritim atau perikanan, dan pesantren agribisnis.

Hadirnya selebriti papan atas seperti Opick, Armada Band dan Fattin Sidqia Lubis kian menambah kemeriahan acara serta menghibur warga sekitar yang kebetulan hadir. Acara itu berjalan dengan lancar dan dihadiri oleh jajaran Kementerian Agama RI, pimpinan Pesantren Darunnajah, santri, guru dan seluruh keluarga besar Darunnajah.

Di hari pertama pembukaan 'Pesantren Festival 2015, Prof Kamaruddin kembali menjelaskan bahwa acara ini menjadi rangkaian dari Deklarasi Hari Santri yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo di Masjid Istiqlal pada 22 Oktober 2015 lalu.

Selain itu, Sekjen Kemenag Prof Nur Syam yang datang mewakili Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang berhalangan hadir pada acara Pembukaan menimpali, agar para santri harus menjadi pelopor dalam pembangunan karakter dan akhlak Muslim Indonesia yang baik.

Hadiah menarik. Di kesempatan yang berbeda, Kasubdit Pendidikan Pesantren Kementerian Agama, Inur Rafiq yang juga sebagai penanggung jawab acara mengungkapkan, nantinya 'Pesantren Festival' akan menjadi acara tahunan yang diselenggarakan oleh Kemenag untuk memajukan kreativitas para santri nusantara.

"Ini memang merupakan Implementasi dari Keppres No 22 Tahun 2015 tentang santri. Salah satunya dengan mengadakan kegiatan 'Pesantren Festival' dimana para adik santri kita dapat mempromosikan dan menampilkan kreativitas dan keterampilan mereka," ungkap Rafiq menambahkan.

Lanjut Rafiq, para panitia penyelenggara harus mengambil pelajaran dari 'Pesantren Festival' yang pertama ini agar menjadi lebih baik di Annual tahun berikutnya.

"'Pesantren Festival' ini adalah acara Annual yang pertama, kita masih mencari bentuk konsep yang sesuai dengan acara 'Pesantren Festival' ini, namun kemungkinan untuk tahun depan kami akan lebih tematik, dan mungkin akan berpindah lokasi, semisalnya sekarang di Jakarta, tahun depan bisa di luar kota, dan santrinya pun bisa bertaraf nasional bahkan kalau bisa internasional," beber Rafiq menerangkan.

Di akhir pembicaraan Rafiq berharap ke depannya Pemerintah RI dapat mendukung penuh acara 'Pesantren Festival' terutama dalam sokongan dana.

"Harapan ke depannya, kalau bisa tahun depan lebih meriah, nasional, dan kepada bapak Presiden agar dapat terus mendukung acara ini bahkan dapat memberikan sumbangan dana lebih besar lagi," ujar Rafiq, melempar senyum kepada Majalah Aktual. *Leonina K Lahama, Ferro Maulana*

Situs Bersejarah di Tanah Suci Sudah Habis



Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), KH Said Aqil Siradj, menyatakan, situs bersejarah di Tanah Suci yang berkaitan dengan kesejarahan Islam, sudah tak lagi wujud fisiknya alias habis.

"Bukan lagi makin habis, tetapi sudah habis," kata dia, di Cirebon, sesuai memberi pencerahan pada Muktamar I Asosiasi Bina Haji dan Umroh Nahdlatul Ulama (Asbihu-NU) di Cirebon, Ahad (6/12) dini hari.

Ia tak menyebut situs bersejarah apa saja yang sudah dihancurkan di Arab Saudi. Namun ia berharap tempat-tempat bersejarah di sana, di antaranya rumah tempat kelahiran Rasulullah Muhammad SAW di kawasan Masjidil Haram, Makkah.

Rumah berukuran kurang lebih 10 X 18 meter ini dikhawatirkan akan dihancurkan sebagai bagian dari perluasan Masjidil Haram. Rumah ini tak dirawat, tidak seperti situs bersejarah di Indonesia.

Diduga pemerintah Arab Saudi sengaja membiarkan rumah ini tetap menjadi perpustakaan dan selalu terkunci karena pemerintah setempat khawatir jika rumah ini dibangun rapi akan dijadikan tempat syirik oleh jamaah haji yang tidak mengerti masalah tauhid.

Dia berharap, situs bersejarah seperti tempat lahir Rasulullah Muhammad SAW di kawasan Masjidil Haram tidak dibongkar. Demikian pula beberapa masjid yang lokasinya tidak jauh dari Masjidil

Haram hendaknya dapat dilindungi.

Menanggapi internasionalisasi penanganan penyelenggaraan ibadah haji, ia menyatakan tidak setuju. Sebab, hal itu menyangkut kedaulatan negeri bersangkutan. Pihaknya hanya bisa mengimbau dan berharap adanya perbaikan. Kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan keselamatan umat harus terus menerus dapat perhatian semua pihak.

Musibah Mina, yang menelan korban jiwa dalam jumlah besar pada penyelenggaraan ibadah haji pada 2015 tidak cukup dapat dijadikan alasan negara lain ikut campur dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Wacana Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mengambilalih penyelenggaraan ibadah haji, menurut Said, tidak bisa. OKI tidak memiliki otoritas untuk mengatur penyelenggaraan ibadah haji.

Namun yang harus diwaspadai adalah upaya penyebarluasan paham di negeri itu. Ia mengaku prihatin ada organisasi di Makkah, menyebarkan paham ajaran tidak sesuai dengan ahlussunnah wal jamaah. Biasanya mereka itu memberikan buku dan kaset kepada anggota jamaah haji di seputar Masjidil Haram.

Buku yang berisi dengan menyebut ziarah kubur haram, tahlilan haram dan lainnya itu, menurut Said Aqil, justru tak sesuai dengan paham oleh sebagian umat Islam di Tanah Air, Bagusnya, nahdhiyin tak terpengaruh dengan paham tersebut. */Wahyu Romadhoni-Ant*

Meletakkan Indonesia di Masa Depan

Hendrajit

Jangan pandang sebelah mata soal jatuhnya pesawat tempur Rusia di perbatasan Suriah dan Turki beberapa waktu lalu.

Setidaknya, itu yang sering diisyaratkan pakar ilmu Eskatologi Islam, Prof Imran Nazar Husein. Sudah beberapa tahun ini, dia selalu mengingatkan hal ini. Interpretasi ilmiahnya terhadap beberapa ayat kitab suci Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW membawa pada sebuah titik simpul: salah satu tanda akhir zaman adalah ketika terjadi perang antara Rusia dan Turki. Dan Rusia akan menjadi pemenang dalam perang itu.

Prof Imran tidak pernah tahu sampai sejauh apa tingkat eskalasi peperangan itu. Apakah bisa disebut, perang antara keduanya adalah picu Perang Dunia III, sebuah perang nuklir maha hebat yang pernah ada?

Namun, kalau melihat perang geopolitik dan geoekonomi saat ini, Turki adalah anggota NATO yang didukung langsung oleh AS, Inggris, Israel dan beberapa negara Eropa. Layak ketika Turki ditekan Rusia atas penembakan pesawatnya maka NATO berdiri langsung di belakang Turki.

Akan halnya Rusia. Di belakangnya berdiri China dan Irak. Selama ini, dua negara itu ada di belakang Rusia yang menjadi garda terdepan menyelamatkan posisi Presiden Suriah Bashar al Assad dari tekanan pemberontak ISIS yang didukung AS, Inggris, Israel dan Saudi Arabia itu.

Dalam analisis geopolitik, ada dua momentum besar dibalik persetujuan antara Rusia dan Turki yakni "kalahnya" AS lawan Rusia ketika Krimea "direbut" kembali oleh Rusia lewat Revolusi Oranye beberapa saat lalu. Sejarah perang Krimea menunjukkan bahwa Krimea memang dari awal sudah jadi rebutan. Krimea juga pernah dilepas dari Uni Soviet tanpa persetujuan dari parlemen oleh mantan Presiden Nikita Krushev. Krimea adalah lokasi pertahanan yang sangat strategis untuk menempatkan rudal-rudal nuklir jika terjadi perang.

"Kekalahan" langkah AS dan sekutunya berikutnya adalah ketika kembali "dijegal"

Rusia di Suriah. Dalam analisis eskatologi Islam, menurut Prof Imran, di samping isu ekonomi dan energi, AS, Inggris dan Israel sangat berkepentingan untuk menguasai Damaskus, ibukota Suriah. Di Damaskus lah, nantinya akan muncul tiga sosok penting menurut teks suci umat Islam, Kristen bahkan Yahudi yakni Nabi Isa as (Jesus Christ); Dajjal (Anti Christ) yang mengaku sebagai Nabi Isa as (Jesus Christ); dan Imam Mahdi ra.

Jadi, ada kepentingan besar untuk menguasai Damaskus. Di satu sisi, kepentingan untuk melindungi kemunculan Dajjal (Anti Christ) dan di sisi lain yang ingin melindungi kemunculan Nabi Isa as (Jesus Christ) dan Imam Mahdi ra. Khalayak sering mengatakan bahwa kepentingan yang ingin melindungi Dajjal (Anti Christ) adalah kaum Zionis. Sebaliknya, yang ingin melindungi Nabi Isa as (Jesus Christ) dan Imam Mahdi ra. adalah umat Islam dan umat Kristiani.

Setidaknya, itu adalah sedikit gambaran masa depan dari sudut eskatologi Islam yang bisa diramalkan secara ilmiah meski perlu dikritisi dalam beberapa hal.

Setidaknya juga, itu juga bisa dijadikan rujukan untuk menentukan politik luar negeri Indonesia ke depan agar tidak hanyut dalam arus yang justru merugikan kepentingan bangsa dan negara ini.

Sukarno, sebenarnya sudah memberi banyak sinyal soal ini ketika mengeluarkan Keputusan Presiden No. 264 Tahun 1962. Inti dari Kepres tersebut adalah larangan kegiatan Zionisme berkembang di Indonesia. Dalam bahasa lain, negara dengan tegas menyatakan "perang" dengan Zionisme.

Sukarno melihat, hakikat musuh negara bangsa ini bukan negara kapitalis, bukan negara komunis atau negara sosialis. Tapi kepentingan kelompok Zionis dibalik kebijakan-kebijakan negara tertentu yang merugikan bangsa dan negara Indonesia dan banyak negara lain.

Seyogyanya, ini jadi catatan penting bagi rezim Jokowi dan JK untuk menentukan kebijakan luar negerinya. Terutama pada saat ini dimana negara ini sedang mendapat tekanan luar biasa dari luar maupun dalam. ◦



Swastanisasi PLN

...kungan kapitalisme global sejak pasca swastanisasi kelistrikan di Indonesia Bank Dunia sejak 1997, agaknya jadi memasuki zona merah neoliberalisme. Misalnya, ketika pertumbuhan ekonomi diprediksi bakal mencapai 8 persen per tahun, maka pencapaian pertumbuhan kelistrikan adalah parameter kontraksi sebesar 100 persen atau pertumbuhan kontraksi sebesar dua kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional, yang mengupayakan penyediaan tenaga listrik.

Kelistrikan tersebut berhasil. Terbukti listrik swasta dengan

Independence Power Project (IPP)

...swastanisasi kelistrikan Indonesia pada tahun 1997, agaknya jadi memasuki zona merah neoliberalisme. Misalnya, ketika pertumbuhan ekonomi diprediksi bakal mencapai 8 persen per tahun, maka pencapaian pertumbuhan kelistrikan adalah parameter kontraksi sebesar 100 persen atau pertumbuhan kontraksi sebesar dua kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional, yang mengupayakan penyediaan tenaga listrik.

kemudian di Alhasil, mencari dan investasi s campur tahapan ekonom perker sektor dari pe la ke Seba terga energi dima

Tentu saja kerja d... tahapan awal untuk menerapkan sk... dalam meliberalisasikan dan men... swastanisasi kelistrikan Indonesia. Rencana makro kelistrikan dan men... baru menemukan momentumnya... privatisasi PLN pada 1997, setahun menjelang kejatuhan Presiden Suharto

Kalau kita menilik kembali aksi subversif korporasi-korporasi energi global AS melalui IMF dan Bank Dunia, sebenarnya mereka sudah mengincar sektor ketenaga-listrikan Indonesia sejak 1970-an. Lagi-lagi Perkins punya cerita menarik tentang soal ini. Waktu itu, Pemerintahan Suharto sempat menerapkan Proyek Listrik Masuk Desa atau Prolisdes. Sepintas kalau kita lihat secara kasat mata, gagasan tersebut sangat mulia ini adalah masyarakat desa. Namun agenda yang sesungguhnya, menurut pengakuan Perkins, Prolisdes merupakan salah satu strategi CIA untuk memprovokasi pemerintah Indonesia agar terjebak dalam skema utang luar negeri dengan dalih untuk meningkatkan rasio elektrifikasi.

Selain itu, juga melalui skema utang luar negeri di sektor ketenaga-listrikan, pemerintah Suharto didorong agar membangun Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA), tenaga panas bumi (PLTP), tenaga uap dengan bahan bakar batu bara (PLTU), tenaga uap berbahan bakar

Polsemik Pencopotan Buwas DPR RI Lino Seolah-Olah Bisa Atur Negara

Kebakaran Terjadi di RSJ Athena.

Hadiri Kampanye Trump, DPR 60 Mahasiswa Dewan Kehormatan

Prabowo Dijak G... PKS TIGA

Permana Kali Dalam Sej... Poin Ditembuskan ke Me...

Hormati Putusan Mutasi, AB...

Awas Dana Pensiun dan Asuran... Ambus Untuk Buy-Back Saham D...



Berita teraktual tersaji,
untuk Anda mengawali hari ...

Info Dan Pemasaran :
☎ 0812 053 8776 (Deddy) | 0838 210 4469 (Ranie) | 0818 2809 41 009 (Rhiza)
✉ iklan@aktual.com | marketing@aktual.com | sirkulasi@aktual.com
🌐 www.aktual.com



sejahtera di hari tua

js siharta

js siharta merupakan pilihan tepat bagi setiap kepala keluarga yang merencanakan kebutuhan :

- Persiapan dana untuk hari tua
- Persiapan dana untuk biaya pendidikan atau pernikahan anak
- Keperluan dana darurat
- Tabungan biaya kesehatan hari tua



Official Insurance Partner of Manchester City Football Club in Indonesia



ASURANSI JIWA PENDIDIKAN PENSIUN INVESTASI ANUITAS KESEHATAN

www.jiwasraya.co.id

CALL 021 1500151